



Kemendikdasmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

LAPORAN KINERJA 2025



**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

Tim Penyusun

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Novita Indri Garini Lestari | Ketua |
| 2. Andri Sutrisno | Anggota |
| 3. Ana Lusiana | Anggota |
| 4. Dani Ashari | Anggota |
| 5. Marta Nur Muhammad | Anggota |

Tim Reviu

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Fransisca Nur`aini K. | Ketua |
| 2. Arya Gamma Aditia | Anggota |
| 3. Pande Putu Khrisna Ariyudha | Anggota |
| 4. Yudi Setyo Jati | Anggota |

Tim Evaluasi SAKIP

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Novita Indri Garini Lestari | Ketua |
| 2. Andri Sutrisno | Anggota |
| 3. Dian Almanto | Anggota |
| 4. Winahyu | Anggota |
| 5. Muhamad Sulaiman | Anggota |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2025 tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Dokumen Laporan Capaian Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program layanan pengujian pendidikan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel.

Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian yang telah dilakukan serta membantu dalam proses proses langkah-langkah ke depan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang teridentifikasi selama tahun tersebut.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang layanan pengujian pendidikan, serta menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, 27 Januari 2026

Kepala



Fransisca Nur'aini K, S.Si. Apt.,M.P.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
D. Isu dan Peran Strategis	6
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan Strategis	8
D. Rencana Kinerja Jangka Menengah	9
E. Program Prioritas	9
F. Rencana Kerja dan Anggaran	12
G. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Program/Agenda Prioritas	31
C. Realisasi Anggaran	48
D. Kinerja Lainnya	52
BAB IV	58
PENUTUP	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isu dan Peran Strategis BPPP Tahun 2025	6
Tabel 2. Matriks Rencana Strategis BPPP Periode 2025-2029	9
Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran BPPP TA 2025 (dalam ribuan rupiah)	13
Tabel 4. Target Renstra dan Matriks Revisi Perjanjian Kinerja BPPP 2025	14
Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPPP Tahun 2025	17
Tabel 6. Definisi Operasional IKK	19
Tabel 7. Capaian berdasarkan Klasifikasi Layanan Pengujian Tahun 2025	20
Tabel 8. Matriks Capaian IKK 2.1	27
Tabel 9. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024-2025	29
Tabel 10. Capaian RO Prioritas Nasional	31
Tabel 11. Jumlah Peserta yang Dilayani per Politeknik Pariwisata	46
Tabel 12. Rincian Penyerapan Anggaran per Indikator (dalam ribuan rupiah)	48
Tabel 13. Matriks Efisiensi Anggaran BPPP 2025	50
Tabel 14. Capaian IKU BLU BPPP Tahun 2025	52
Tabel 15. Survei Layanan Pengujian BPPP Tahun 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian IKK 1.1 BPPP Tahun 2025	8
Gambar 2. Capaian IKK 2.1 BPPP Tahun 2025	9
Gambar 3. Capaian IKK 2.2 BPPP Tahun 2025	10
Gambar 4. Capaian Anggaran BPPP TA 2025	10
Gambar 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2022–2025	11
Gambar 6. Struktur Organisasi BPPP	4
Gambar 7. Kondisi SDM BPPP Tahun 2025	5
Gambar 8. Diversifikasi Layanan dan Mitra Pengujian Pendidikan	11
Gambar 9. Alokasi Anggaran BPPP per Sumber Dana 2022–2027	12
Gambar 10. Jumlah pendaftar SNBP Tahun 2023 s.d. 2025	37
Gambar 11. Titik sebaran 74 Pusat UTBK–SNBT	40
Gambar 12. Jumlah pendaftar SNBT Tahun 2023 s.d. 2025	40
Gambar 13. Perbandingan Total Peserta Terlayani pada Tes Substantif dan UKPPPG Calon Guru Tahun 2023–2025	43
Gambar 14. Perbandingan Total Peserta Terlayani pada UKPPPG Guru Tertentu Tahun 2023–2025	45
Gambar 15. Aplikasi model	56

DAFTAR LAMPIRAN

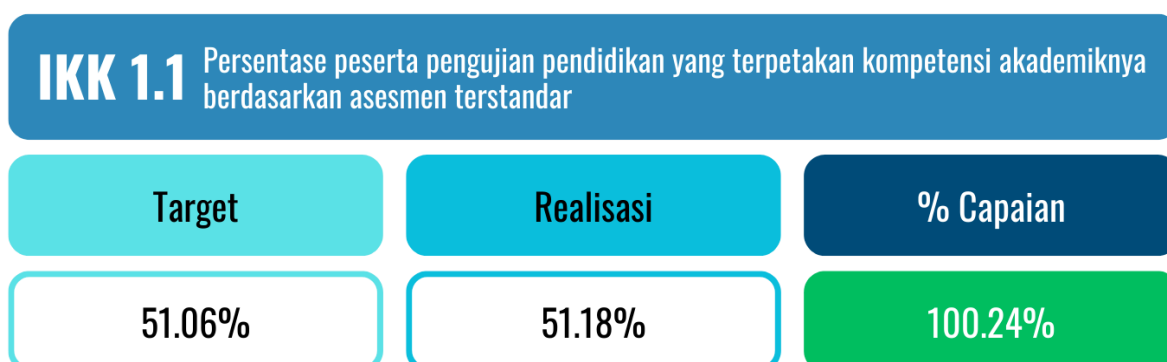
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (Awal)	60
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Revisi)	62
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Triwulan I	64
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan II	68
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan III	72
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan IV	76
Lampiran 7. Pernyataan Reviu Laporan Kinerja BPPP Tahun 2025	80

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) pada tahun 2025 melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara terencana dan terfokus guna mendukung pencapaian tujuan strategis. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan hasil yang positif, menggambarkan peningkatan efektivitas kinerja dalam menunjang pencapaian sasaran strategis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

Pencapaian tersebut ditopang oleh perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Walaupun dalam implementasinya ditemui sejumlah kendala, telah dilakukan upaya perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja serta menjadi dasar peningkatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja BPPP Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian dari Sasaran Kegiatan (SK) Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan; dan Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Kedua Sasaran Kinerja diturunkan ke dalam tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Gambar 1. Capaian IKK 1.1 BPPP Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1 terkait Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar diukur berdasarkan jumlah peserta pengujian dan jumlah target populasi peserta yang *eligible* untuk mengikuti asesmen terstandar.

Indikator tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan asesmen terstandar dalam memetakan kompetensi akademik peserta sehingga menunjukkan jangkauan sistem pendidikan terhadap peserta yang berhak (*eligible*) untuk mendapatkan layanan asesmen baik dalam konteks penilaian kompetensi, seleksi, sertifikasi, maupun asesmen lainnya.



Gambar 2. Capaian IKK 2.1 BPPP Tahun 2025

Capaian IKK 2.1 terkait Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan telah tercapai pada tahun 2025 dengan nilai 94,98 yang termasuk pada kategori sangat baik. Capaian tersebut diukur berdasarkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA.

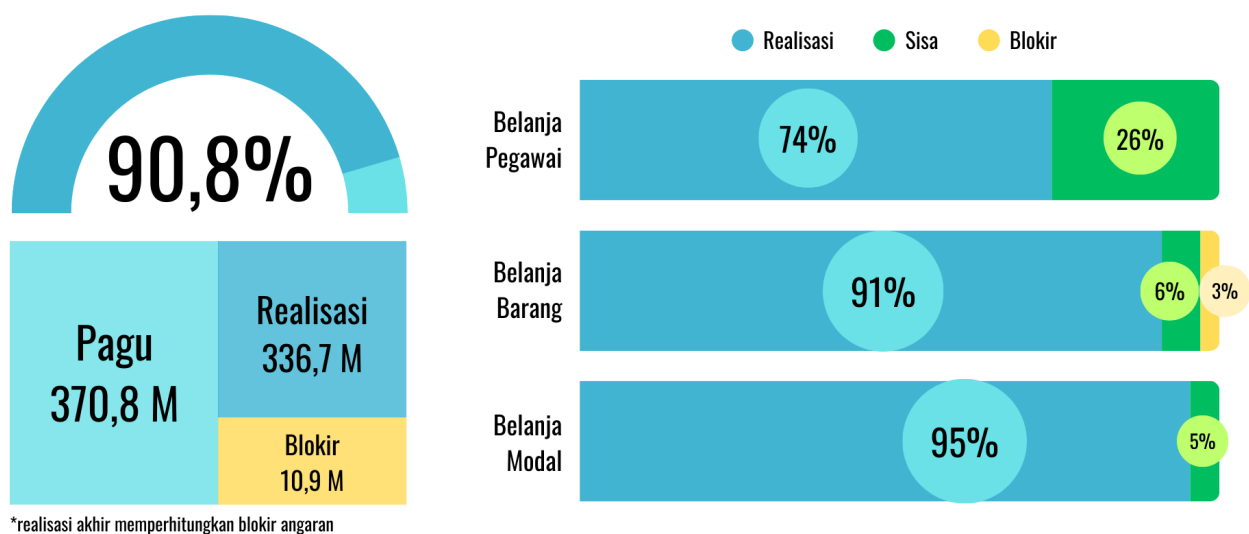
IKK 2.2

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB

Target	Realisasi	Ket. Capaian
BB	BB	Tercapai

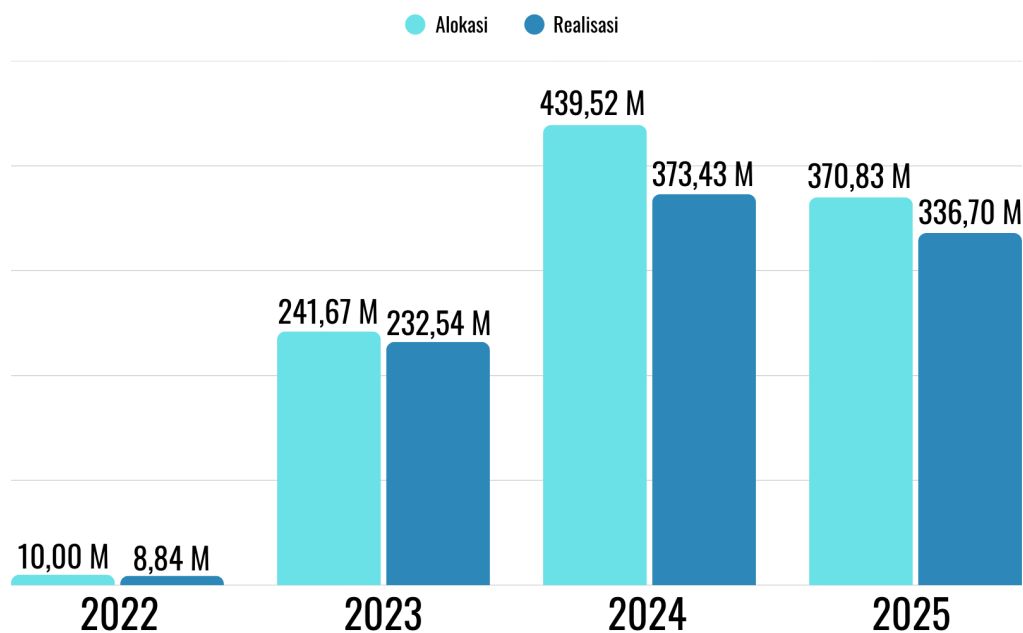
Gambar 3. Capaian IKK 2.2 BPPP Tahun 2025

Capaian IKK 2.2 terkait Predikat Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berhasil tercapai dengan nilai 79,4 yang termasuk predikat “BB”. Capaian tersebut diukur berdasarkan komponen penyusun yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.



Gambar 4. Capaian Anggaran BPPP TA 2025

BPPP pada Tahun Anggaran 2025 merealisasikan anggaran sebesar Rp336.701.789.025 atau 90,80% dari total pagu anggaran Rp370.835.630.000. Pemanfaatan realisasi anggaran BPPP TA 2025 terdiri dari Rp3.119.935.929 terkait belanja pegawai, Rp333.283.751.496 terkait belanja barang, dan Rp298.101.600 terkait belanja modal.



Gambar 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2022-2025

Berdasarkan grafik tersebut, alokasi anggaran BPPP mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Alokasi anggaran terendah pada tahun 2022 dikarenakan satuan kerja BPPP terbentuk efektif pada akhir tahun. Sejak tahun 2023 BPPP resmi menerapkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Peningkatan yang signifikan terjadi pada periode 2023-2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Hal tersebut seiring dengan dinamika volume sasaran pada program prioritas di BPPP terkait layanan pengujian pendidikan yang terdiri dari:

- Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)
- Layanan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) untuk Calon Guru dan Guru Tertentu
- Layanan Seleksi Bakat Skolastik (SBS) untuk Peserta Beasiswa LPDP
- Layanan Seleksi Masuk Politeknik Pariwisata
- Layanan pengujian mitra lainnya.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target.

Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
1 Kebutuhan SDM pendukung pelaksanaan layanan pengujian belum dapat dipenuhi dari SDM satker	1 Mengajukan permohonan penugasan satker di lingkup BSKAP terkait bantuan SDM
2 Kendala teknis aplikasi pelaksanaan layanan pengujian	2 Penyesuaian operasional aplikasi layanan pengujian oleh tim teknis
3 Kebijakan linimasa layanan pengujian PPG yang relatif padat dan dinamis	3 Percepatan pada langkah persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban layanan pengujian
4 Infrastruktur jaringan pendukung layanan pengujian PPG yang terdampak keadaan kahar	4 Koordinasi teknis dan penyesuaian ulang jadwal pelaksanaan ujian (susulan)
5 Keterbatasan anggaran pada awal masa pelaksanaan layanan akibat kebijakan efisiensi	5 Pengajuan dispensasi anggaran dan penambahan pagu belanja bersumber dari saldo awal kas BLU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dasar pembentukan BPPP adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

BPPP lahir sebagai salah satu wujud transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya dalam rangka optimalisasi tata kelola seleksi masuk perguruan tinggi yang sebelumnya diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) serta pelayanan pengujian kepada masyarakat yang dilakukan secara terbatas oleh Pusat Asesmen Pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1109/MK.05/2024 Tanggal 1 Desember 2024 Tentang Penetapan Kembali Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 060/H/R/2025 tentang Rencana Strategis BSKAP Tahun 2025–2029;
16. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2023–2027.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 44 tahun 2022, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Adapun tugas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan adalah melaksanakan pengelolaan pengujian pendidikan.

Fungsi

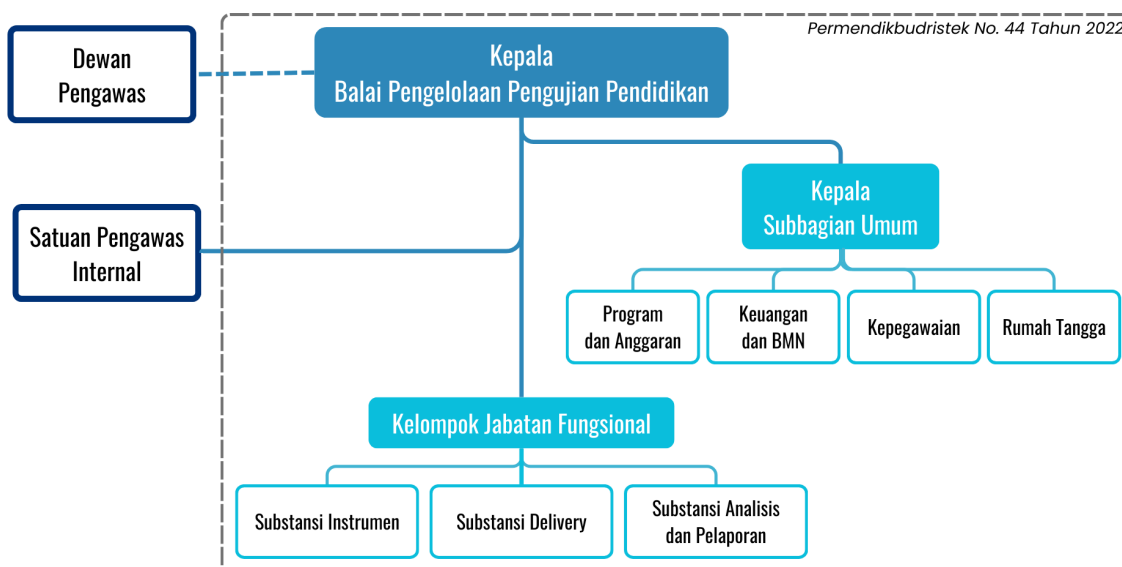
Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur Organisasi

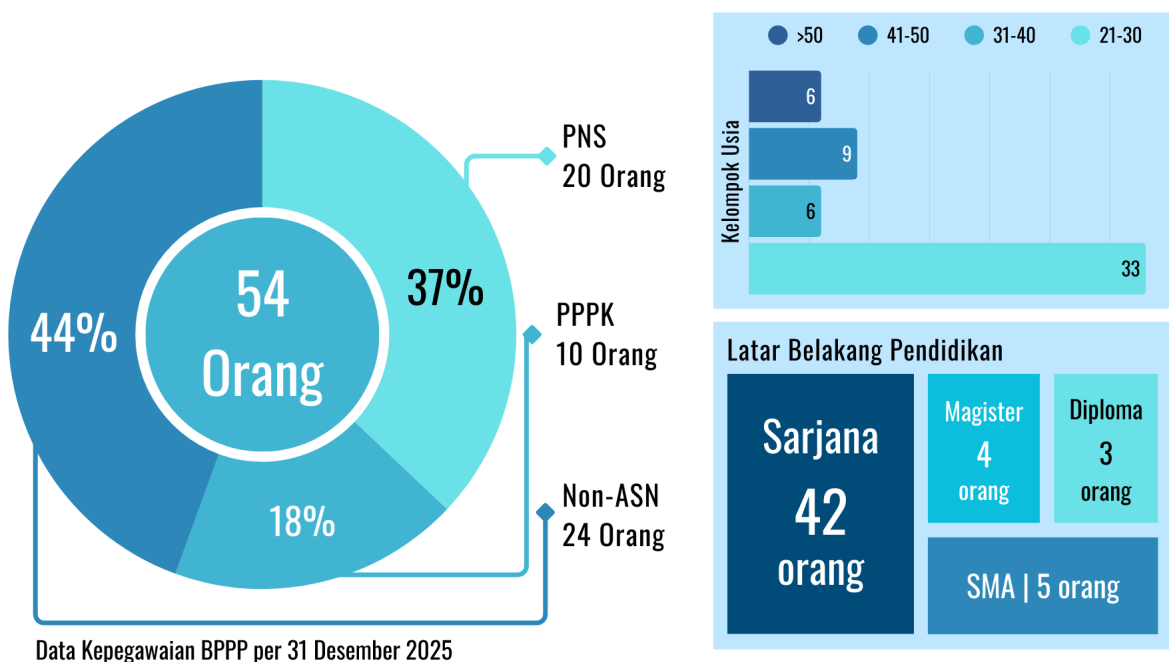
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satker, BPPP memiliki struktur organisasi sebagai aspek kelembagaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Struktur organisasi yang telah tersusun diharapkan dapat menjelaskan garis komando atau koordinasi, menggambarkan tingkat pengendalian internal, dan menggambarkan pengelompokan fungsi yang logis.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Nomor 0770/H4.1/OT.01.00/2025 ditetapkan susunan tim kerja yang terdiri dari Tim Pengelolaan Pengujian Pendidikan (Instrumen, Delivery, serta Analisis dan Pelaporan) dan Tim Subbagian Umum (Program dan Anggaran, Keuangan dan BMN, Kepegawaian, serta Rumah Tangga). BPPP yang juga merupakan satker dengan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) juga didukung oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal dalam implementasi, pemantauan dan evaluasi layanan pengujian pendidikan. Struktur organisasi BPPP disajikan sebagai berikut.



Gambar 6. Struktur Organisasi BPPP

Sebagai upaya untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan prosedur, BPPP didukung sejumlah sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai kualifikasi dan latar belakang bidang keahlian. Jumlah SDM BPPP pada tahun 2025 sebanyak 54 orang yang terdiri atas 20 orang PNS, 10 orang PPPK dan 24 orang berstatus non-ASN, dengan mayoritas pendidikan terakhir adalah tingkat Sarjana/S1 dari berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan rentang usianya, sebagian besar didominasi pada rentang usia 21-30 tahun.



Gambar 7. Kondisi SDM BPPP Tahun 2025

D. Isu dan Peran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP pada tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain:

Tabel 1. Isu dan Peran Strategis BPPP Tahun 2025

Isu Strategis	Peran Strategis
1. Penuntasan sertifikasi pendidikan bagi guru tertentu merupakan kebijakan yang perlu menyeimbangkan antara kualitas guru dengan kelayakan penghasilan guru. Sehingga layanan pengujian kelulusan program PPG perlu menitikberatkan pada pengukuran kompetensi yang relevan dan dikaitkan dengan program pengembangan profesi berkelanjutan.	1. BPPP bersama panitia nasional Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru memformulasikan profil lulusan PPG guru tertentu yang mengedepankan pengukuran kemampuan pedagogik. Kompetensi profesional berupa pengetahuan substansi dikuatkan melalui berbagai program sebagai bagian dari pengembangan profesi berkelanjutan.
2. Seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah proses seleksi yang sangat kompetitif dan berdampak pada jalan karir individu peserta didik. oleh karena itu layanan pengujian yang berkualitas, kredibel dan akuntabel menjadi mutlak untuk memastikan tidak ada keterlambatan, kesalahan, bias, maupun kecurangan.	2. BPPP berperan mengawal transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN, meliputi program sarjana dengan diploma. Transformasi berupa substansi pengujian yang bersifat holistik dan berfokus pada penalaran serta memberikan kesempatan murid mengembangkan karir pendidikan sesuai bakat dan minatnya.
3. Seleksi masuk PTN dan layanan pengujian lain dikenakan tarif kepada masyarakat. Dana PNBPN yang terkumpul setiap tahunnya relatif besar. Tata kelola anggaran perlu dipastikan efisien dan efektif, dan dikelola seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan.	3. BPPP dibentuk dengan tujuan melaksanakan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, efisien dan efektif. Implementasi kewenangan untuk mengelola anggaran dari masyarakat bertujuan pada peningkatan kualitas layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung upaya Presiden dalam rangka,

**Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua
dengan dukungan partisipasi semesta
dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas 2045**

Sesuai tugas dan kewenangannya, salah satu peran penting Kementerian melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) adalah melaksanakan pengelolaan berbagai layanan pengujian pendidikan dengan menekankan aspek kredibilitas dan integritas untuk memastikan bahwa proses pendidikan di Indonesia terus berkembang sesuai dengan standar, mendukung pencapaian sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global. Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan tugas BPPP berupa pengelolaan pengujian pendidikan, BPPP mempunyai visi,

**Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan
yang Kredibel dan Berintegritas**

B. Misi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,

dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Upaya mendukung misi Kementerian dalam bidang pengelolaan pengujian pendidikan sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengujian yang kredibel untuk uji kompetensi dan seleksi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan pengujian yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
3. Melakukan pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian secara objektif.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengujian melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Merujuk pada fokus pelayanan prima dan visi serta misi tersebut maka prinsip kerja yang diusung BPPP dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kewajaran.

C. Tujuan Strategis

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berkomitmen dalam implementasi layanan pengujian pendidikan yang kredibel dan berintegritas melalui : (1) Penyusunan instrumen yang valid, reliabel, dan prosedur yang terstandar; (2) Pengembangan sistem pengelolaan pengujian yang transparan dan akuntabel; (3) Pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian secara objektif; (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengujian melalui pendidikan dan pelatihan; serta (5) Pengembangan jejaring kerja sama dan diversifikasi layanan pengujian.

D. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Matriks Kinerja

BPPP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Asesmen Pendidikan memiliki dua Sasaran Kegiatan (SK) dan pada setiap sasaran tersebut diukur melalui satu atau beberapa indikator pengukuran, yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada level IKK ini, capaian output dievaluasi secara berkala dan dilaporkan dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN). Dalam rangka mengukur ketercapaian Rencana Strategis BPPP, maka dibuat turunan dari perencanaan kinerja lima tahunan ke dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahunan.

Tabel 2. Matriks Rencana Strategis BPPP Periode 2025–2029

Kode	Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.1	Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	Persen	51.06	52.48	53.90	55.32	56.74
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Predikat	BB	A	A	A	A

E. Program Prioritas

Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan

Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen merupakan dokumen rekomendasi kebijakan terhadap hasil asesmen terstandar yang sudah dilakukan oleh BPPP melalui kerja sama dengan mitra. Ruang lingkup sasaran meliputi hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), hasil Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) dan hasil pengujian lainnya.

Rekomendasi bahan kebijakan disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran menggunakan asesmen terstandar, yang mencakup berbagai wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia. Adapun dampak yang diharapkan pada rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen ini adalah pemanfaatannya dalam perbaikan pembelajaran serta pertimbangan penyempurnaan sistem pengelolaan pengujian pendidikan dari waktu ke waktu.

Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani

BPPP memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pengelolaan pengujian pendidikan dengan ruang lingkup sasaran berupa peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar. Implementasi layanan pengujian pendidikan terdiri dari:

1. Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang merupakan amanat kebijakan tingkat nasional berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 072/A/PR.07.04/2025 tentang Anggaran Pelaksanaan SNPMB PTN Tahun 2025..
2. Layanan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) yang juga merupakan amanat kebijakan tingkat nasional berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Pendidikan Guru Nomor 0414/B.B2/GT.00.02/2025 tentang Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
3. Layanan Seleksi Bakat Skolastik (SBS) untuk peserta beasiswa yang merupakan layanan berbasis kemitraan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

4. Layanan Seleksi Masuk Politeknik Pariwisata yang merupakan layanan berbasis kemitraan, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata yang menaungi enam Politeknik Pariwisata di seluruh Indonesia.
5. Layanan pengujian lainnya dengan lingkup yang lebih eksklusif berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama mitra. Layanan yang dimaksud seperti Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura, Seleksi Akademi Militer TNI, dan Seleksi Guru P3 SMA Taruna Nusantara.



Gambar 8. Diversifikasi Layanan dan Mitra Pengujian Pendidikan

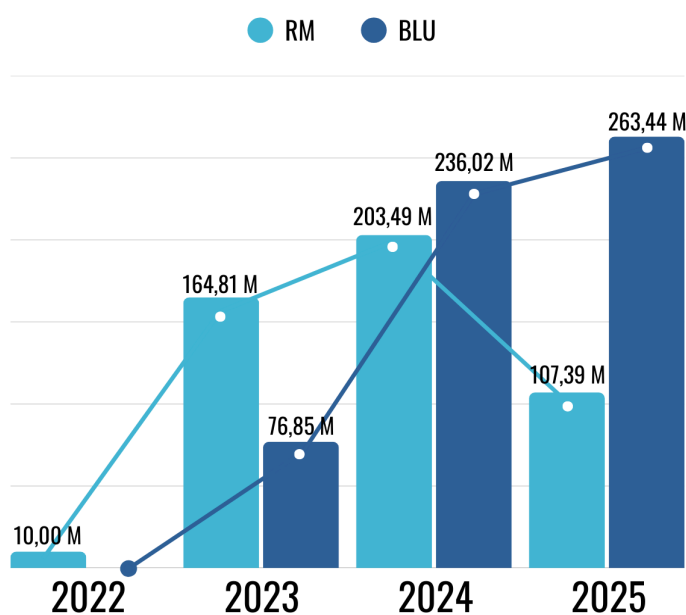
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pencapaian output Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani sebagai berikut.

1. Koordinasi teknis dan administrasi pengelolaan layanan pengujian.
2. Penyusunan instrumen yang valid, reliabel, dan prosedur yang terstandar.
3. Pengembangan sistem pengelolaan pengujian yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

4. Pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian secara objektif.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengujian melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Pengembangan jejaring kerja sama dan diversifikasi layanan pengujian dengan pemangku kepentingan.

F. Rencana Kerja dan Anggaran

BPPP sebagai pengguna anggaran telah melakukan penyusunan rencana kerja sejak berdirinya satker secara efektif pada akhir tahun 2022. Berikut grafik alokasi anggaran BPPP Tahun 2022-2025 yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 9. Alokasi Anggaran BPPP per Sumber Dana 2022-2027

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BPPP telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025. Adapun rencana kerja BPPP memuat target dan alokasi anggaran terhadap output program yang dilaksanakan di lingkup BPPP.

Selama tahun anggaran berjalan 2025 BPPP melakukan beberapa tahapan revisi anggaran khususnya terkait peningkatan volume layanan pengujian pendidikan. Hal tersebut tercantum pada pergerakan anggaran yang semula (DIPA Awal) sebesar Rp197.720.056.000 menjadi Rp370.835.630.000, serta peningkatan volume target pada Rincian Output Peserta pengujian pendidikan yang terlayani yang semula 1.835.000 orang menjadi 2.582.514 orang. Secara keseluruhan peningkatan signifikan baik secara anggaran maupun target volume terjadi karena kebijakan dalam rangka percepatan penuntasan sertifikasi guru (UKPPPG).

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran BPPP TA 2025 (dalam ribuan rupiah)

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN	SATUAN	DIPA 2025					BLOKIR
			AWAL		REVISI TERAKHIR			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
693265	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan			197.720.056		370.835.630		10.916.129
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			187.481.525		360.596.099		10.404.277
7607	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan			187.481.525		360.596.099		10.404.277
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan			1.024.992		1.024.992		403.299
001	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1.024.992	1	1.024.992		403.299
QAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			186.147.617		359.262.191		9.829.562
001	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	1.835.000	186.147.617	2.581.514	359.262.191		9.829.562
QMA	Data dan Informasi Publik			308.916		308.916		171.416
002	Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Data	1	308.916	1	308.916		171.416

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN	SATUAN	DIPA 2025				BLOKIR
			AWAL		REVISI TERAKHIR		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
WA	Program Dukungan Manajemen			10.238.531		10.239.531	511.852
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud			10.238.531		10.239.531	511.852
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			10.238.531		10.239.531	511.852
956	Layanan BMN	Dokumen	-	-	1	10.000	-
962	Layanan Umum	Layanan	1	1.000.000	1	990.000	400.974
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	9.238.531	1	9.239.531	110.878

G. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029. BPPP menetapkan sasaran, indikator, dan target sesuai dengan rencana strategis dan mengacu pada rencana strategis BSKAP sebagai berikut.

Tabel 4. Target Renstra dan Matriks Revisi Perjanjian Kinerja BPPP 2025

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
			Renstra	PK Awal	PK Revisi
SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	Persen	51.06	51.06	51.06

SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	Predikat	BB	BB	BB

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran	
		PK Awal	PK Revisi
7607	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan	Rp187.481.525.000	Rp360.596.099.000
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp10.238.531.000	Rp10.239.531.000
Total Anggaran		Rp197.720.056.000	Rp370.835.630.000

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis, BPPP menetapkan target tahunan yang diimplementasikan melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja merupakan hasil pertimbangan evaluasi capaian periode sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran.

Perjanjian kinerja adalah instrumen administrasi yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan dalam rencana strategis melalui pelaksanaan oleh satuan kerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja menjadi wujud komitmen dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang berlandaskan pada rencana strategis lembaga. Dokumen ini memuat kesepakatan terkait target kinerja yang wajib direalisasikan dalam jangka waktu tertentu.

Pada periode 2025, terdapat langkah revisi perjanjian kinerja khususnya terkait perubahan anggaran. Perubahan tersebut merupakan implementasi perencanaan berbasis kinerja. Revisi anggaran dilaksanakan dalam rangka mengakomodir peningkatan volume layanan pengujian pendidikan, implementasi revisi informasi kinerja, dan optimalisasi belanja pegawai terkait pemenuhan belanja operasional perkantoran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun tingkat ketercapaian dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan selama tahun 2025 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPPP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	Persen	51,06	51,18	100,24
2	SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100
		[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	Predikat	BB	BB	100

SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan

Kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan bertujuan untuk menyediakan informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan guna mendukung sasaran kegiatan tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan.

Ketercapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu IKK 1.1 Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar dengan capaian 51,18% dari yang semula ditargetkan 51,06%. Realisasi atas capaian indikator tersebut merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan asesmen terstandar dalam memetakan kompetensi akademik peserta sehingga menunjukkan jangkauan sistem pendidikan terhadap peserta yang berhak (*eligible*) untuk mendapatkan layanan asesmen baik dalam konteks penilaian kompetensi, seleksi, sertifikasi, maupun asesmen lainnya.

IKK 1.1 Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar

Indikator persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar menggambarkan proporsi peserta pengujian yang kompetensinya telah terpetakan melalui asesmen terstandar terhadap target populasi yang ditetapkan. Indikator ini merupakan inisiasi baru atas penyesuaian pada tahun Renstra 2025–2029 dan perhitungan capaian dilakukan secara non kumulatif sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir

renstra. Perhitungan capaian IKK mengacu pada definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 6. Definisi Operasional IKK

IKK 1.1	Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar
Definisi Operasional	Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar dalam rangka penilaian kompetensi, seleksi, sertifikasi, dan asesmen lainnya. Peserta yang terpetakan kompetensi akademiknya dapat dimaknai bahwa peserta tersebut telah diidentifikasi atau dipetakan tingkat penguasaan akademiknya (misalnya literasi membaca, literasi numerasi, maupun bidang studi tertentu), sehingga dapat diketahui posisi atau level kompetensinya melalui asesmen terstandar berupa pengujian dengan instrumen yang valid, reliabel, dan prosedur yang terstandar. Adapun pengujian-pengujian yang akan diukur capaiannya adalah pengujian dengan ruang lingkup sebagai berikut: • Penilaian kompetensi, bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan akademik peserta ujian. • Seleksi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masuk jenjang pendidikan berikutnya atau kebutuhan rekrutmen organisasi. • Sertifikasi, bertujuan untuk memberikan sertifikat bagi peserta ujian sebagai salah satu prasyarat dalam pencapaian dalam karir tertentu, misalnya sertifikasi profesi guru, tenaga pendidik, atau profesi tertentu lainnya. • Asesmen lainnya: misalnya untuk memenuhi kebutuhan diagnosis terhadap kompetensi akademik peserta, kebutuhan intervensi terhadap pembelajaran, dan sebagainya.
Cara Perhitungan	Hitung persentase dari jumlah peserta pengujian yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar dibandingkan dengan jumlah target populasi peserta yang eligible untuk mengikuti asesmen. Simulasi Perhitungan: Indikator persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya didapatkan dari: • PPx : Jumlah peserta pengujian yang telah mendapatkan hasil penilaian individu berdasarkan hasil asesmen terstandar • PPn : Jumlah target populasi peserta pengujian yang eligible untuk mengikuti asesmen terstandar Perhitungan persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar: $\frac{PPx}{PPn} \times 100\%$

Capaian BPPP di tahun 2025 terkait IKK peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar dijabarkan berdasarkan klasifikasi layanan pengujian sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian berdasarkan Klasifikasi Layanan Pengujian Tahun 2025

No	Nama Layanan Pengujian	Target Populasi	Realisasi Jumlah Peserta Pengujian yang Dinilai
1	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)	3.593.811 *)	1.637.491
2	Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Guru Tertentu	1.330.000	809.043
3	Seleksi Masuk dan Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru	102.465	99.779
4	Kegiatan pengujian Pendidikan lainnya	64.313	58.857
TOTAL (PERSENTASE)		5.090.589 (100%)	2.605.170 (51,18%)

*) Meliputi peserta aktif kelas XII dan *gap year* sesuai kebijakan SNPMB 2025

Pada proses SNPMB 2025 terdapat dua jalur yang pelaksanaannya menjadi tugas dari BPPP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Adapun syarat untuk mendaftar sebagai peserta SNBP adalah siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir (kelas XII) pada tahun 2025, sementara untuk peserta SNBT mencakup siswa yang lulus pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Mengacu pada kebijakan tersebut, maka target populasi yang ditetapkan untuk layanan pengujian SNPMB mencakup jumlah peserta aktif kelas XII pada tahun 2025 serta siswa yang lulus pada tahun 2023 dan 2024. Adapun realisasi jumlah peserta pengujian yang dinilai sebesar 1.637.491 peserta terdiri atas 776.515

peserta yang diseleksi melalui jalur SNBP dan 860.976 peserta yang mengikuti SNBT.

Berdasarkan Data Pokok Pendidik (Dapodik) tahun 2024, terdapat lebih dari satu juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan berkualifikasi S-1/D-IV. Penetapan target populasi dari layanan pengujian UKPPPG Guru Tertentu tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pergerakan data jumlah guru belum bersertifikat pendidik serta perubahan kebijakan terkait cakupan peserta *eligible* untuk mengikuti UKPPPG Guru Tertentu tahun 2025. Sebagai wujud dari pelaksanaan program prioritas nasional, telah dilaksanakan sebanyak tujuh periode pengujian UKPPPG bagi Guru Tertentu di tahun 2025, dengan total 809.043 peserta yang telah terpetakan nilainya serta memiliki status kelulusan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 82.386 peserta dan tahun 2024 sebanyak 656.940, menunjukkan upaya BPPP dalam mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan guru bersertifikat pendidik.

Sejak tahun 2023, BPPP dimandatkan untuk melaksanakan layanan pengujian Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru, meliputi seleksi masuk Pendidikan Profesi Guru serta Uji Kompetensi untuk kelulusan peserta Pendidikan Profesi Guru. Target populasi peserta pengujian dihitung berdasarkan jumlah peserta yang melakukan pendaftaran pada sistem informasi BPPP, terdiri atas 80.025 peserta seleksi masuk dan 22.440 peserta uji kompetensi kelulusan PPG. Adapun realisasi sebesar 99.779 merupakan jumlah peserta pengujian yang telah memiliki nilai serta status kelulusan.

Selain mendukung penyelenggaraan SNPMB dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pada Tahun 2025 BPPP juga memperluas cakupan layanan melalui

penyelenggaraan berbagai pengujian bagi instansi mitra. Layanan pengujian tersebut meliputi seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seleksi Bakat Skolastik untuk Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, Seleksi Jalur Mandiri Universitas Tanjungpura, serta Seleksi Pamong Pengajar Pengasuh (P3) SMA Taruna Nusantara. Perluasan dan diversifikasi layanan pengujian ini berdampak pada peningkatan target populasi layanan, yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 64.313 peserta berdasarkan jumlah pendaftar pada sistem informasi mitra. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58.857 peserta telah mengikuti pengujian dan memiliki nilai hasil pengujian. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 48.445 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi layanan pengujian yang disertai penguatan kemitraan berkontribusi positif terhadap peningkatan cakupan layanan BPPP.

Beberapa kegiatan terkait substansi yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan SNPMB, UKPPPG, seleksi LPDP, dan pengujian lainnya, meliputi:

- 1) Evaluasi berupa penyesuaian rasio pengawas vs peserta pada moda daring domisili untuk pelaksanaan TBS LPDP
- 2) Penyesuaian jumlah hari ujian dan paket soal seiring penambahan hari ujian
- 3) Optimalisasi fungsi *helpdesk* pada sistem ujian
- 4) Pertimbangan opsi ujian susulan bagi yg terkendala teknis

Adapun kegiatan-kegiatan administrasi untuk mendukung pelaksanaan SNPMB, UKPPPG, seleksi LPDP, dan pengujian lainnya, meliputi:

- 1) Kategorisasi nilai pekerjaan untuk penentuan metode swakelola

- 2) Implementasi pendanaan secara langsung dari BP3 untuk validitas dan kendali penuh thd pelaksanaan ptgjwb keuangan pada Guter daerah khusus terkendala internet
- 3) Penggabungan UKPPPG Guru tertentu Periode 5 dan 6 ke dalam 1 (satu) kontrak untuk memangkas waktu kontrak dan mempermudah pertanggungjawaban

Pemenuhan target terkait indikator jumlah keikutsertaan pada pelaksanaan asesmen terstandar yang berkualitas menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2023, 2024, maupun 2025. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2022, yaitu pada pertengahan periode Rencana Strategis 2020–2024, BPPP masih menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada Pusat Asesmen Pendidikan dengan perhitungan capaian berupa jumlah lembaga. Penggunaan satuan perhitungan tersebut relevan dalam konteks kebijakan pengujian pendidikan pada periode sebelumnya, yang sebagian besar berorientasi pada cakupan kelembagaan.

Seiring dengan berkembangnya mandat BPPP dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pengujian pendidikan yang bersifat individual, penggunaan Lembaga sebagai satuan indikator dinilai kurang merepresentasikan kinerja aktual organisasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilakukan penyesuaian indikator kinerja, termasuk perubahan satuan pengukuran menjadi persentase peserta yang terpetakan kompetensinya. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, karena satuan tersebut dapat secara langsung mencerminkan jumlah individu yang memperoleh layanan asesmen dan hasil pemetaan kompetensi. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan keberlanjutan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya,

tetapi juga mencerminkan transformasi pengelolaan kinerja BPPP yang lebih adaptif terhadap diversifikasi layanan pengujian pendidikan.

Dalam Rencana Strategis BPPP Tahun 2025–2029, capaian IKK ditargetkan meningkat secara bertahap dari 52,48% pada Tahun 2026 hingga 56,74% pada Tahun 2029. Dengan capaian Tahun 2025 yang telah memenuhi target serta didukung oleh rencana pengembangan dan diversifikasi layanan pengujian pendidikan yang dilaksanakan oleh BPPP, capaian kinerja yang telah diperoleh menjadi dasar bagi BPPP untuk mempertahankan praktik yang telah berjalan dengan baik sekaligus melakukan penguatan kualitas pelaksanaan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya.

Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- Keterlambatan sekolah dalam mengisi nilai siswa *eligible* di PDSS saat proses SNBP 2025.
- Terdapat kebutuhan SDM pengawas ujian dengan jumlah yang cukup banyak dikarenakan penyesuaian teknis pengelolaan dan pengawasan ujian.
- Terdapat kendala anggaran di awal pelaksanaan pengujian dikarenakan efisiensi.
- Terdapat kendala teknis aplikasi ujian saat pelaksanaan.
- Terdapat kejadian kahar pada rentang pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu bagi Daerah Khusus Terkendala Internet dan Periode 5 Tahun 2025, sehingga peserta dari beberapa daerah terdampak mengalami kendala dalam mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan.
- Padatnya linimasa yang ditetapkan oleh mitra terkait beberapa pengujian di Bulan Desember 2025 cukup menjadi kendala pada saat

pelaksanaan pengawasan di LPTK serta pengolahan dan pelaporan hasil pengujian oleh BPPP.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Membuka kesempatan khusus kepada sekolah yang hanya tinggal melakukan finalisasi data.
- Mengajukan permohonan penugasan kepada satuan kerja di lingkup BSKAP terkait bantuan SDM pengawas.
- Dilakukan penyesuaian teknis pada aplikasi pengujian sehingga dapat segera terselesaikan dan berjalan relatif lebih lancar tanpa kendala.
- Dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan ujian bagi peserta yang terdampak bencana, sehingga peserta yang terdampak bencana tetap dapat mengikuti ujian dengan baik.
- Dilakukan penyesuaian jadwal pengolahan dan pelaporan hasil pengujian dengan menggabungkan beberapa periode pengujian pada satu waktu.

SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Ketercapaian sasaran pada kegiatan meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dijelaskan dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025 yang **Sangat Baik** dengan nilai **94,98** dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2025 yang diperoleh yaitu **BB** dengan nilai **79,4**.

Ketercapaian tersebut mendukung Indikator Kinerja Program Kemendikdasmen (IKP 5.25) berupa peningkatan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dan (IKP 5.26) peningkatan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja berdasarkan integrasi hasil pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran. Proses evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui penggabungan komponen evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta peraturan teknis lain yang terkait.

Komponen EKA atau Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:

- Dimensi efektivitas yang diukur melalui capaian realisasi output
- Dimensi efisiensi yang merupakan perbandingan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK).

Sedangkan komponen IKPA atau Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Kualitas perencanaan → Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Kualitas pelaksanaan → Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP dan Dispensasi SPM.
- Kualitas hasil → Capaian Output.

Berdasarkan data dari aplikasi Monev Kemenkeu per tanggal 8 Januari 2026, BPPP memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA sebesar 89,96 sehingga didapatkan NKA sebesar 94,98 untuk tahun 2025 yang termasuk ke dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran BPPP pada Tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan output yang ditetapkan.

Upaya BPPP dalam optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran antara lain:

- Koordinasi internal dengan pendampingan unit eselon I terkait penyesuaian pelaksanaan anggaran akibat kebijakan eksternal (efisiensi anggaran dan perubahan linimasa program) dalam rangka menjaga kualitas luaran dan pertanggungjawaban tetap optimal.
- Koordinasi anggaran terkait kebutuhan peningkatan layanan pengujian pendidikan melalui mekanisme revisi anggaran DIPA BLU.
- Penyusunan dan pemutakhiran rencana penarikan dana atau Halaman III DIPA secara periodik (triwulan).
- Proses revisi anggaran secara internal atau revisi POK dalam rangka memperkuat mekanisme perencanaan kontingensi dan mengakomodir percepatan pertanggungjawaban belanja BLU.

Tabel 8. Matriks Capaian IKK 2.1

Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%	
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik

Implementasi kinerja anggaran pada prosesnya terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Pelaksanaan anggaran untuk beberapa program yang sudah dijadwalkan belum dapat dioptimalkan karena implementasi kebijakan efisiensi anggaran pada awal 2025.
- Terdapat ketidaksesuaian data *supplier* terkait pembayaran tagihan kontrak (hotel, swakelola) sehingga penyelesaian tagihan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

- Akibat penambahan linimasa layanan UKPPPG yang relatif mendekati akhir tahun anggaran, terdapat keterlambatan proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan baik secara internal satker maupun pertanggungjawaban yang melibatkan pihak eksternal (LPTK, TUK, pelaksana kegiatan eksternal lainnya).

Beberapa tindak lanjut yang dilakukan atas kendala atau hambatan supaya target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Koordinasi internal penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka menjaga kualitas luaran/output tetap optimal.
- Dilakukan konfirmasi dengan pihak penyedia/penerima swakelola terkait data supplier serta berkoordinasi dengan pihak KPPN terkait penyelesaian retur SP2D.
- Dilakukan percepatan dan koordinasi pihak eksternal secara lebih intensif, serta optimalisasi SDM internal satker dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban.

IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB

Sebagai satuan kerja yang berdiri pada akhir tahun 2022, BPPP pertama kali dilakukan evaluasi AKIP di tahun 2024. Di tahun tersebut, BPPP memperoleh nilai 76.7 dengan predikat BB. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, satuan kerja yang baru pertama kali dilakukan penilaian SAKIP memiliki batas predikat tertinggi sebesar BB. Hal ini berkaitan dengan salah satu komponen utama penilaian SAKIP yaitu komparasi dengan capaian predikat SAKIP tahun sebelumnya, sehingga terdapat beberapa komponen yang belum tersedia untuk dinilai.

Pada tahun 2025 telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang mencakup aspek Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sehubungan dengan hasil evaluasi dan perbaikan tersebut, capaian BPPP pada tahun 2025 memenuhi target, yaitu predikat BB dengan nilai 79,4 menunjukkan ketercapaian kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peningkatan skor ini menunjukkan adanya perbaikan pada aspek pengelolaan kinerja dan menjadi landasan bagi BPPP untuk mempertahankan praktik pengelolaan kinerja yang telah berjalan serta melakukan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 9. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024-2025

Komponen	Bobot	Nilai	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja	30%	24	24,6
Pengukuran Kinerja	30%	22,2	22,5
Pelaporan Kinerja	15%	11,25	12,3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,25	20
Predikat		76,7 (BB)	79,4 (BB)

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didukung oleh beberapa upaya sebagai berikut:

- Koordinasi internal terkait strategi pelaksanaan program di lingkungan satuan kerja.
- Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun sebelumnya.
- Koordinasi persiapan evaluasi AKIP oleh tim evaluasi satker bersama tim evaluasi unit eselon I BSKAP yang mencakup penyusunan serta pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung.

Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- Keterbatasan SDM yang telah mengikuti pelatihan SAKIP dan implementasi yang belum optimal.
- Terdapat kemungkinan kebijakan pergeseran program prioritas sehingga berpotensi adanya ketidaksesuaian dengan hasil usulan renstra.
- Penyusunan draft RSB baru mengalami penundaan dalam waktu yang cukup lama dikarenakan linimasa dan target penyelesaian yang belum ditentukan secara konkret.
- Terdapat kendala pemenuhan dokumen pendukung terkait digitalisasi pencatatan transaksi PNB/BLU berdasarkan hasil rekomendasi evaluator AKIP.

Beberapa tindak lanjut yang dilakukan atas kendala atau hambatan supaya target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Dilakukan koordinasi serta pendampingan dengan pihak terkait (unit eselon I, biro, serta satker lain dalam lingkup BSKAP) terkait implementasi SAKIP yang lebih optimal.
- Dilakukan akselerasi dan asistensi dengan pihak terkait untuk penyelesaian dokumen pendukung tindak lanjut LHE AKIP 2024.
- Dilakukan koordinasi lintas kementerian serta dengan pihak terkait dalam rangka finalisasi usulan renstra yang sesuai dan mendukung program kementerian/lembaga.
- Terkait digitalisasi pencatatan transaksi PNB, BPPP mengajukan sebagai satker piloting untuk penerapan aplikasi SAKTI BLU yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Tabel 10. Capaian RO Prioritas Nasional

Rincian Output	Capaian Anggaran		Capaian Fisik	
	Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	1.024.992.000	489.067.277	1	1
Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	359.262.191.000	327.792.040.647	2.581.514	2.614.503

1. Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan

Evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, SNPMB berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan perguruan tinggi menjadi pintu mobilitas sosial yang inklusif. Kajian menunjukkan bahwa meskipun seleksi telah terbuka bagi semua siswa, faktor status sosial ekonomi masih berpotensi memengaruhi aspirasi dan peluang diterima, sehingga inklusivitas dimaknai tidak hanya sebagai kesempatan mendaftar yang sama, tetapi juga kesetaraan peluang untuk berhasil diterima di program studi yang kompetitif.

Untuk mendukung tujuan tersebut, beberapa kebijakan kunci dikaji lebih lanjut, antara lain pemanfaatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen pembanding nilai rapor agar seleksi lebih objektif dan terstandar, serta implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk memperkuat akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu. TKA dipandang mampu meningkatkan akuntabilitas seleksi, sementara KIP-K berperan memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi siswa berprestasi untuk masuk PTN, termasuk pada

program studi kompetitif. Melalui integrasi kedua instrumen ini, SNPMB 2025 diharapkan dapat menopang transformasi pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Adapun ruang lingkup kajian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kajian Eksplorasi Hasil SNPMB 2025.

- Inklusivitas kondisi sosial ekonomi peserta pada penerimaan SNPMB 2025.
- Perbandingan kemampuan siswa dalam SNPMB tahun 2025 berdasarkan jenis satuan pendidikan.
- Resiliensi subtes UTBK terhadap kondisi sosial ekonomi.
- Daya prediksi nilai rapor pada jalur SNBP

b. Kajian Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk SNBP

- Identifikasi isu potensial terjadi jika SNBP hanya didasarkan pada nilai rapor siswa.
- Identifikasi dan merumuskan berbagai skema pemanfaatan TKA untuk SNBP 2025.
- Analisis imputasi skor tidak lengkap.

c. Kajian Penerapan KIP-Kuliah (KIP-K) pada SNPMB 2025

- Pola pendaftaran KIP-K pada prodi kompetitif.
- Peluang pada proses seleksi SNPMB 2025 untuk pendaftar KIP-K.
- Evaluasi skema alokasi beasiswa KIP-K bagi calon mahasiswa.

Secara umum, SNPMB 2025 terus menjamin adanya inklusivitas dalam proses seleksi, utamanya dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi. Pembaharuan kajian juga dilakukan untuk melihat efektivitas dan potensi isu penggunaan nilai rapor pada seleksi jalur prestasi serta untuk pemerataan alokasi beasiswa KIP-K bagi seluruh kategori yang berhak menerima. Berdasarkan hasil analisis kajian yang telah

dilakukan, rekomendasi diberikan untuk berbagai unsur, baik kepada pemerintah atau penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi, perguruan tinggi, maupun rekomendasi bagi satuan pendidikan.

Pemerintah atau penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi perlu untuk menjamin sistem seleksi berjalan objektif, inklusif, dan transparan, mengintegrasikan TKA sebagai instrumen pembanding nilai rapor di SNBP agar seleksi lebih akuntabel, serta memperluas akses pembelajaran Bahasa Inggris yang berkualitas dan murah agar kesenjangan kemampuan bahasa tidak menjadi hambatan bagi siswa dalam menghadapi seleksi maupun studi di perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, disarankan untuk mengembangkan program studi yang kompetitif di setiap wilayah melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan minat siswa, serta penetapan bidang-bidang prioritas yang berpotensi unggul, sehingga dapat mendorong calon mahasiswa memilih PTN lokal tanpa harus menempuh pendidikan lintas pulau. Bagi satuan pendidikan, perlu diberikan perhatian utama pada upaya menjaga integritas proses penilaian rapor dengan memastikan bahwa nilai yang diberikan benar-benar mencerminkan capaian belajar siswa secara objektif dan akurat. Hal ini menjadi penting agar rapor tetap berfungsi sebagai instrumen seleksi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan pada jalur prestasi. Untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik, satuan pendidikan perlu memberikan dukungan yang lebih optimal dalam proses sosialisasi Beasiswa KIP-K, baik kepada siswa maupun orang tua. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang akurat dan komprehensif mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta tahapan seleksi, disertai dengan penyampaian kisah-kisah inspiratif dari penerima KIP-K sebelumnya. Upaya ini diharapkan dapat

mendorong siswa dari keluarga kurang mampu untuk lebih berani dan percaya diri dalam mendaftar ke PTN, termasuk pada program studi yang bersifat kompetitif.

2. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB 2025)

Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan salah satu tugas utama yang dilaksanakan oleh BPPP dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penataan ulang kelembagaan di bidang pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Dalam masa transisi tersebut, pelaksanaan SNBP dan SNBT 2025 tetap dilaksanakan oleh BPPP di bawah koordinasi Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Adapun pelaksanaan SNPMB dilakukan dengan dukungan dari Tim Pelaksana SNPMB yang sebelumnya telah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada tahun 2024 sehingga kesinambungan kebijakan dan tata kelola seleksi tetap terjaga serta pelaksanaan seleksi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

BPPP bersama Tim Pelaksana SNPMB bertugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses seleksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tugas utama yang diemban dalam penyelenggaraan SNPMB mencakup:

- a. Pengelolaan Data dan Registrasi.
 - Mengelola PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) untuk SNBP.
 - Integrasi data dengan Dapodik, EMIS, BAN-SM.
 - Memastikan keakuratan data sekolah dan siswa.
 - Registrasi akun siswa untuk SNBP dan SNBT.
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan Seleksi.
 - Pemeringkatan nilai rapor untuk SNBP.
 - Pengembangan dan pengelolaan soal UTBK (TPS & Literasi).
 - Pelaksanaan UTBK berbasis komputer dengan pengawasan ketat.
- c. Sosialisasi dan Layanan Informasi.
 - Penyebaran informasi melalui website, media sosial, leaflet, dan konferensi pers.
 - Layanan Helpdesk dan Call Center untuk membantu pendaftaran.
 - Koordinasi dengan sekolah dan PTN.
- d. Penjaminan Mutu dan Evaluasi.
 - Monitoring seluruh tahapan SNBP & SNBT.
 - Identifikasi kendala seperti kesalahan data NISN dan rapor.
 - Perbaikan sistem seleksi berdasarkan hasil evaluasi.
- e. Pengelolaan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
 - Kesiapan infrastruktur IT untuk pendaftaran dan ujian.
 - Fasilitas aksesibilitas bagi peserta difabel.
 - Keamanan sistem untuk mencegah kecurangan.

SNPMB terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang bertujuan untuk menjaring dan menyeleksi calon mahasiswa baru yang memiliki kualitas akademik unggul serta memiliki potensi untuk menyelesaikan

studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Seleksi ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh peserta tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Melalui SNBP dan SNBT, setiap calon mahasiswa diberikan peluang yang luas dan fleksibel untuk memilih program studi di berbagai jenis perguruan tinggi, baik PTN Akademik, PTN Vokasi, maupun PTKIN, dengan kebebasan untuk memilih lintas wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta dalam mengejar pendidikan tinggi sesuai dengan minat, bakat, dan arah pengembangan diri yang diharapkan, tanpa terhalang oleh batasan geografis atau latar belakang sosial ekonomi.

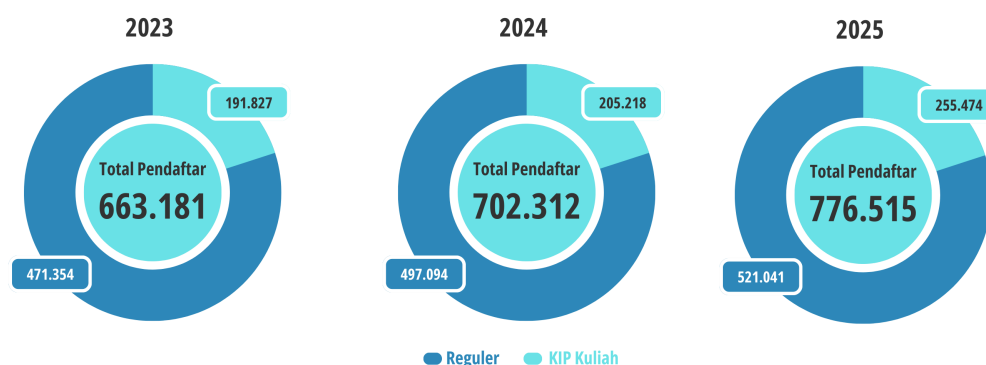
Dengan demikian, SNBP dan SNBT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi berbasis prestasi dan kemampuan akademik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

A) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prestasi akademik dan prestasi lainnya. Jalur ini diselenggarakan secara terintegrasi oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dan PTN Vokasi di Indonesia, dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu dalam setiap tahapan seleksi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses penerimaan mahasiswa. Penilaian dalam SNBP dilakukan berdasarkan:

- 1) Nilai akademik, yang diperoleh dari hasil belajar siswa selama jenjang pendidikan menengah.
- 2) Kombinasi nilai akademik dan prestasi lainnya, seperti prestasi bidang olahraga, seni, maupun kejuaraan akademik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.

SNBP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus melalui ujian tertulis, sehingga siswa dapat fokus pada pencapaian akademik selama masa studi di sekolah. Pembiayaan pelaksanaan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, menggunakan anggaran dari sumber dana Rupiah Murni (RM), sehingga peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran, yang bertujuan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh calon mahasiswa tanpa terkendala faktor ekonomi.



Gambar 10. Jumlah pendaftar SNBP Tahun 2023 s.d. 2025

Gambar tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendaftar SNBP Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik pada kelompok pendaftar KIP Kuliah maupun pendaftar reguler. Peningkatan ini salah satunya didukung oleh upaya BPPP dalam mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi dan Promosi (Sospro) pelaksanaan SNPMB yang dilakukan oleh

Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui peningkatan nilai kontrak swakelola dari Rp53.273.091.700,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp56.775.660.100,00 pada Tahun 2025. Kenaikan anggaran ini memberikan ruang bagi PTN untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke berbagai wilayah serta mengembangkan inovasi metode Sospro guna meningkatkan motivasi dan minat siswa serta sekolah dalam mengikuti SNBP 2025.

B) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

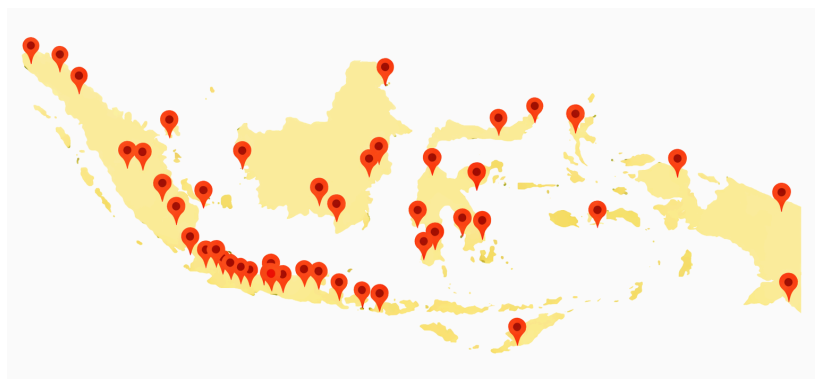
SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN bersangkutan. SNBT diselenggarakan oleh seluruh PTN Akademik dan PTN Vokasi dari seluruh Indonesia, secara terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas. Tahapan SNBT meliputi pengembangan tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, penyediaan dokumen ujian, pelaksanaan UTBK, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan monitoring, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta pengkajian dan pengembangan.

Pembiayaan pelaksanaan SNBT menggunakan dana Rupiah Murni dan dana masyarakat. Tarif UTBK-SNBT sebesar Rp200.000,00 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2023 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Seleksi Nasional

Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023. Selain itu, pelaksanaan ini juga diperuntukan bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sesuai dengan pasal 2, besaran tarif seleksi nasional berdasarkan tes untuk perguruan tinggi negeri program diploma/ sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan/atau menerima program bantuan sosial, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

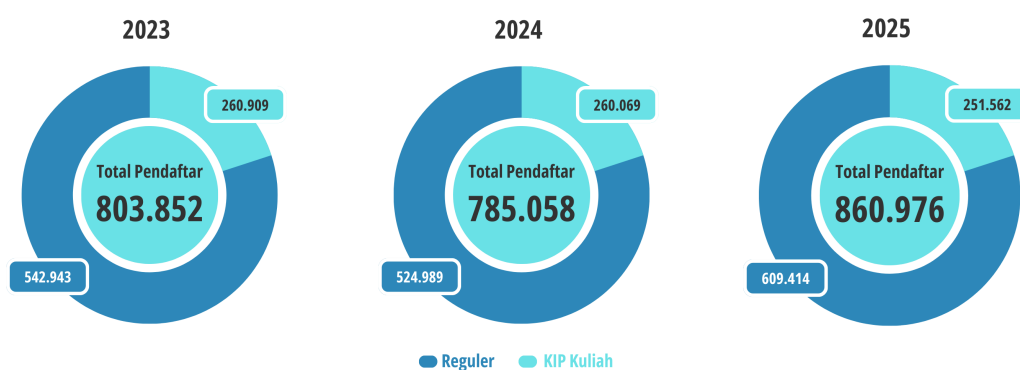
SNBT dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon mahasiswa di Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, melalui sistem seleksi yang transparan, adil, dan diawasi secara ketat. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan mahasiswa baru berjalan sesuai standar mutu dan mencerminkan asas inklusivitas pendidikan.



Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT dalam peta Indonesia

No.	Nama	No.	Nama
1	Universitas Syiah Kuala	38	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
2	Universitas Malikussaleh	39	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
3	Universitas Teuku Umar	40	Universitas Jember
4	Universitas Samudra	41	Universitas Brawijaya
5	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	42	Universitas Negeri Malang
6	Universitas Sumatera Utara	43	Universitas Airlangga
7	Universitas Negeri Medan	44	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8	Universitas Riau	45	Universitas Negeri Surabaya
9	Universitas Maritim Raja Ali Haji	46	Universitas Trunojoyo
10	Universitas Andalas	47	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
11	Universitas Negeri Padang	48	Universitas Tanjungpura
12	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	49	Universitas Palangka Raya
13	Universitas Jambi	50	Universitas Lambung Mangkurat
14	Universitas Bengkulu	51	Universitas Mulawarman
15	Universitas Sriwijaya	52	Institut Teknologi Kalimantan
16	Universitas Bangka Belitung	53	Universitas Borneo Tarakan
17	Universitas Lampung	54	Universitas Udayana
18	Institut Teknologi Sumatera	55	Universitas Pendidikan Ganesha
19	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	56	Institut Seni Indonesia Denpasar
20	Universitas Indonesia	57	Universitas Mataram
21	Universitas Negeri Jakarta	58	Universitas Nusa Cendana
22	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	59	Universitas Timor
23	Universitas Singaperbangsa Karawang	60	Universitas Hassanuddin
24	Institut Teknologi Bandung	61	Universitas Negeri Makassar
25	Universitas Padjadjaran	62	Universitas Sam Ratulangi
26	Universitas Pendidikan Indonesia	63	Universitas Negeri Manado
27	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	64	Universitas Tadulako
28	Institut Pertanian Bogor	65	Universitas Sulawesi Barat
29	Universitas Siliwangi	66	Universitas Haluoleo
30	Universitas Jenderal Soedirman	67	Universitas Negeri Gorontalo
31	Universitas Tidar	68	Universitas Sembilanbelas November Kolaka
32	Universitas Sebelas Maret	69	Universitas Pattimura
33	Institut Seni Indonesia Surakarta	70	Universitas Khairun
34	Universitas Diponegoro	71	Universitas Cenderawasih (Jayapura)
35	Universitas Negeri Semarang	72	Universitas Musamus Merauke
36	Universitas Gadjah Mada	73	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
37	Universitas Negeri Yogyakarta	74	Universitas Papua

Gambar 11. Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT



Gambar 12. Jumlah pendaftar SNBT Tahun 2023 s.d. 2025

Gambar tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah total pendaftar SNBT Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada kelompok pendaftar reguler yaitu dari 524.989 pada tahun 2024 menjadi 609.414 di tahun 2025. Peningkatan ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya: adanya akumulasi peserta dari berbagai angkatan (*gap year* 2023 dan

2024); keterbatasan kuota SNBP; tingginya animo untuk masuk PTN; serta adanya peningkatan jumlah akun permanen SNPMB.

3. Seleksi Masuk dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG)

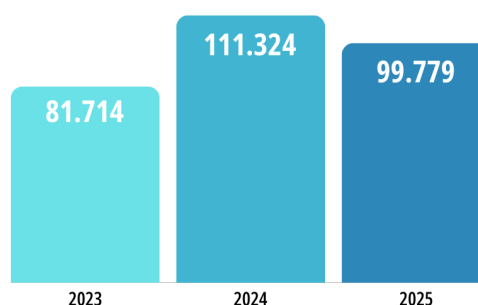
Layanan Seleksi Masuk dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) merupakan bagian integral dari kebijakan nasional dalam peningkatan profesionalisme guru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Program sertifikasi guru mulai diimplementasikan sejak tahun 2007 melalui berbagai skema awal, antara lain Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pemberian Sertifikat Profesi Secara Langsung (PSPL), serta penilaian Portofolio (PF), yang dirancang untuk memberikan pengakuan kompetensi dan meningkatkan kesejahteraan guru. Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, skema tersebut kemudian disempurnakan melalui penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Tertentu yang dilaksanakan secara bertahap pada berbagai periode sampai dengan tahun 2025. Program PPG saat ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan pembukaan pendaftaran dan penetapan kuota setiap tahun bagi guru ASN maupun non-ASN, sehingga layanan seleksi masuk dan uji kompetensi yang dikelola BPPP menjadi instrumen strategis dalam menjamin kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas proses sertifikasi guru serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan guru profesional secara nasional.

A) Seleksi Masuk dan Uji Kompetensi Peserta PPG bagi Calon Guru

PPG bagi Calon Guru merupakan program pendidikan profesi yang disusun untuk mempersiapkan calon guru Indonesia yang memiliki karakter, kompetensi, dan dedikasi tinggi terhadap profesi kependidikan. Program ini diarahkan untuk membentuk pendidik yang profesional, memiliki motivasi kuat dalam mendidik, mampu menjadi teladan, menjunjung tinggi nilai-nilai profesi, serta memiliki komitmen sebagai pembelajar sepanjang hayat. PPG Calon Guru diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan (S-1/D-IV), baik dari bidang kependidikan maupun nonkependidikan, sebagai mekanisme resmi dalam memperoleh sertifikat pendidik dan memasuki dunia profesi guru. Melalui penyelenggaraan program ini, pemerintah memastikan bahwa setiap calon guru yang memasuki sistem pendidikan nasional telah melalui proses pembinaan yang sistematis, terstandar, dan terjamin mutunya.

Proses menjadi guru profesional melalui PPG Calon Guru diawali dengan tahapan seleksi masuk yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan. Sejak tahun 2023, BPPP dimandatkan untuk melayani pada tahapan Tes Substantif untuk menjaring calon peserta yang memenuhi kualifikasi akademik dan potensi dasar sebagai pendidik. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya mengikuti rangkaian Program Pendidikan Profesi Guru selama dua semester, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan, serta pendampingan. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran, peserta diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) sebagai instrumen penilaian akhir untuk menentukan kelulusan dan kelayakan memperoleh sertifikat pendidik. Dengan demikian,

layanan Seleksi Masuk Tes Substantif dan UKPPPG merupakan bagian integral dalam menjamin bahwa lulusan PPG Prajabatan benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme yang diperlukan sebagai guru.



Gambar 13. Perbandingan Total Peserta Terlayani pada Tes Substantif dan UKPPPG Calon Guru Tahun 2023-2025

Pada tahun 2025, total peserta pengujian bagi Calon Guru sebesar 99.779 peserta. Jumlah tersebut merupakan gabungan jumlah peserta seleksi masuk PPG Calon Guru dan peserta uji kompetensi untuk kelulusan PPG Calon Guru. Meskipun terjadi peningkatan pada jumlah peserta seleksi masuk PPG Calon Guru yaitu 63.621 di tahun 2024 dan 80.025 di tahun 2025, namun terjadi penurunan jumlah periode uji kompetensi yang dilaksanakan di tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi.

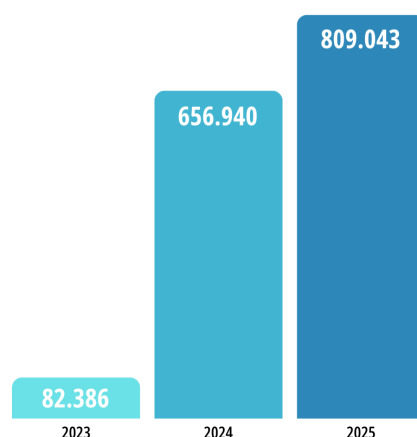
B) Uji Kompetensi Peserta PPG bagi Guru Tertentu

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu merupakan program pendidikan profesi yang diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban sertifikasi guru dalam jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik. Program ini ditujukan untuk guru aktif yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi persyaratan kualifikasi, sehingga kesempatan guru yang

belum tersertifikasi untuk memperoleh pengakuan kompetensi profesionalnya dapat diperluas melalui mekanisme pendidikan profesi yang terstruktur dan berstandar nasional. Melalui penyelenggaraan PPG Guru Tertentu, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga memperkuat status profesional guru sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu diawali dengan tahapan pemanggilan peserta yang memenuhi persyaratan, diikuti dengan proses lapor diri pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditetapkan serta pelaksanaan pembelajaran melalui platform yang disediakan. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, peserta wajib mengikuti Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) sebagai tahapan akhir untuk menentukan kelulusan dan kelayakan memperoleh sertifikat pendidik. UKPPPG terdiri atas dua komponen utama, yaitu uji tertulis untuk mengukur penguasaan pengetahuan profesional dan pedagogik, serta uji kinerja untuk menilai kemampuan praktik pembelajaran secara autentik. Dalam penyelenggaraan UKPPPG tersebut, BPPP dimandatkan sebagai unit pelaksana layanan pengujian sejak tahun 2023. Sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen, BPPP melaksanakan UKPPPG secara intensif melalui enam periode reguler serta satu periode khusus yang diperuntukkan bagi peserta dari daerah dengan keterbatasan akses internet dengan total peserta yang berhasil diuji sebanyak 809.043 orang. Adapun penyelenggaraan periode khusus dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemerataan layanan, sehingga guru yang berasal dari wilayah dengan kendala

infrastruktur jaringan tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti uji kompetensi dan proses sertifikasi.



Gambar 14. Perbandingan Total Peserta Terlayani pada UKPPPG Guru Tertentu Tahun 2023–2025

Gambar di atas menunjukkan peningkatan jumlah peserta terlayani pada UKPPPG Guru Tertentu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengoptimalkan percepatan sertifikasi guru melalui perluasan cakupan layanan pengujian secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga semakin banyak guru dalam jabatan yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan pengakuan profesional melalui sertifikat pendidik.

3. Kegiatan pengujian pendidikan lainnya

Selain layanan pengujian pendidikan berskala nasional yang telah diuraikan sebelumnya, BPPP juga menyelenggarakan berbagai layanan pengujian lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan seleksi pada satuan kerja maupun instansi lain. Adapun beberapa layanan pengujian tambahan yang dilaksanakan oleh BPPP pada Tahun 2025 antara lain:

A) Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Kegiatan layanan pengujian pada Politeknik Pariwisata Kemenparekraf dilaksanakan untuk melayani kebutuhan Seleksi Bersama Masuk (SBM) dan Seleksi Mandiri Politeknik Pariwisata Kemenparekraf. Adapun jumlah peserta yang dilayani per Politeknik Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Peserta yang Dilayani per Politeknik Pariwisata

No	Nama Politeknik Pariwisata	Jumlah Peserta	
		Seleksi Bersama	Seleksi Mandiri
1	NHI Bandung	1.475	-
2	Bali	1.012	-
3	Medan	798	366
4	Makassar	703	384
5	Lombok	573	320
6	Palembang	419	232
Total		4.980	1.302

B) Seleksi Bakat Skolastik untuk Beasiswa LPDP Kemenkeu Tahun 2025

Seleksi Bakat Skolastik (SBS) untuk Beasiswa LPDP Kemenkeu merupakan layanan Tes Non-Akademik Objektif dari BPPP. Seleksi tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap, BPPP pada tahap 1 di bulan April 2025 melayani 27.086 peserta dan tahap 2 di bulan September 2025 melayani 26.581 peserta.

C) Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura

BPPP juga melayani Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Pelaksanaan Seleksi Mandiri tersebut dilakukan pada bulan Juli 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 4.470 orang.

D) Seleksi Guru PPP SMA Taruna Nusantara 2025

Di tahun 2025 ini, BPPP bermitra dengan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) untuk melayani Seleksi Guru PPP SMA Taruna Nusantara 2025. Seleksi ini merupakan rangkaian proses rekrutmen yang dirancang untuk menjaring calon pendidik profesional yang memiliki kompetensi akademik, karakter, serta integritas yang sesuai dengan nilai dan standar pendidikan Taruna Nusantara. Dalam pelaksanaannya, seleksi terdiri atas dua jalur utama, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKD berfokus pada pengukuran kemampuan dasar yang bersifat umum dan fundamental sebagai aparatur pendidik, sedangkan SKB menitikberatkan pada penguasaan kompetensi yang relevan dengan bidang tugas keguruan serta karakteristik pendidikan di lingkungan SMA Taruna Nusantara. Adapun jumlah peserta yang dilayani sebanyak 371 orang pada tahapan SKD dan 161 orang pada tahapan SKB.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPPP dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp197.720.056.000. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat kenaikan Pagu yang bersumber dari BLU sehingga Pagu BPPP terkoreksi menjadi Rp370.835.630.000. Berdasarkan pagu akhir, BPPP merealisasikan sebesar Rp336.701.789.025 dengan persentase daya serap sebesar 90.80% (per 19 Januari 2026). Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 12. Rincian Penyerapan Anggaran per Indikator (dalam ribuan rupiah)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran	Realisasi	%
Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	360.596.099	328.414.407	91,07
Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	10.239.531	8.287.381	80,94
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB			

Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan di BPPP pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp360.596.099.000,00. Anggaran tersebut ditujukan untuk pencapaian kegiatan melalui 3 (tiga) Rincian Output (RO), yaitu (a) Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan dengan anggaran Rp1.024.992.000,00, (b) Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani dengan anggaran Rp359.262.191.000,00, dan (c) Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian dengan alokasi anggaran Rp308.916.000,00.

Selain terkait program kualitas, terdapat anggaran terkait Dukungan Manajemen yang terdiri dari 3 (tiga) RO, yaitu (a) Layanan BMN dengan anggaran Rp10.000.000, (b) Layanan Umum dengan anggaran Rp990.000.000, dan (c) Layanan Perkantoran dengan anggaran Rp9.239.531.000.

Tabel 13. Matriks Efisiensi Anggaran BPPP 2025

KRO	RO				Capaian RO (CRO)	Capaian RO per KRO	Capaian RO Per KRO (Max 120 %)	Anggaran			AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) – RAKRO	Efisiensi	Konversi Efisiensi –20 s.d. 20
	RO	TVRO	RVRO	% (min 1%)				Alokasi Anggaran KRO (AAKRO)	Realisasi Anggaran KRO (RAKRO)	%				
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	1	1	100%	100,21%	100%	100%	1.024.992.000	489.067.277	47,71%	1.027.163.517	538.096.240	9,42%	9,42%
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	2.581.514	2.614.503	101,28%		101,28%	101,28%	359.262.191.000	327.792.040.647	91,24%	360.023.313.076	32.231.272.429		
Data dan Informasi Publik	Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	1	1	100%		100%	100%	308.916.000	133.300.000	43,15%	309.570.460	176.270.460		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1	1	100%		100%	100%	10.000.000	9.992.000	99,92%	10.021.186	29.186		
	Layanan Umum	1	1	100%		100%	100%	990.000.000	551.844.122	55,74%	992.097.384	440.253.262		
	Layanan Perkantoran	1	1	100%		100%	100%	9.239.531.000	7.725.544.979	83,61%	9.259.105.593	1.533.560.614		
TOTAL								370.835.630.000	336.701.789.025	90,80%	371.621.271.216	34.919.482.191		

- Realisasi menggunakan data Realisasi Capaian Anggaran Sakti per 19 Januari 2026

Pada tahun 2025 BPPP telah melakukan efisiensi sebesar Rp34.919.482.191 atau 9,42% dari total alokasi anggaran Rp370.835.630.000. Efisiensi tersebut diperoleh dari beberapa aspek terkait optimalisasi perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, penghematan belanja bahan, dan penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU). Pemanfaatan langkah efisiensi dimanfaatkan kembali untuk mendukung program prioritas lainnya seperti pelaksanaan UKPPPG dan kegiatan kemitraan layanan pengujian pendidikan.

Efisiensi pada BPPP juga terjadi pada aspek sumber daya manusia (SDM) selain terkait optimalisasi anggaran. Berdasarkan data Penataan Pegawai BPPP Tahun 2025, kebutuhan SDM mencapai 51 orang dan hingga periode Desember 2025 terpenuhi sebanyak 30 orang. Terdapat kekurangan SDM sebanyak 11 orang dengan beberapa kualifikasi dan kompetensi yang mendukung tugas dan fungsi satuan kerja.

Dalam rangka optimalisasi kualitas luaran dengan kondisi SDM yang terbatas. BPPP melakukan upaya mekanisme swakelola bersama mitra dan pemenuhan melalui pengadaan tenaga alih daya.

D. Kinerja Lainnya

1. Indikator Kinerja Utama pada Kontrak Kinerja BLU

Dalam rangka mewujudkan tujuan BLU yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala BLU BPPP.

Tabel 14. Capaian IKU BLU BPPP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Margin EBITDA	Indeks	3	3,5
Jumlah Pendapatan Operasional	Rp	174.704.082.339	315.470.340.946
Pendapatan BLU dari optimalisasi aset lancar	Rp	2.567.718.570	3.940.326.178
Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks	3,5	4
Modernisasi Pengelolaan BLU	%	59,33	30,88
Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	Indeks	4	2,25

- Ketercapaian target pada indikator Margin EBITDA dan Jumlah Pendapatan Operasional terjadi karena terdapat kenaikan pendapatan pada SNBT dan ujian program PPG (Seleksi Masuk PPG Calon Guru dan UKPPPG).
- Ketercapaian pada indikator Pendapatan BLU dari optimalisasi aset lancar dikarenakan optimalisasi dari aset

lancar (kas bank) dalam bentuk investasi jangka pendek (deposito).

- Ketercapaian pada indikator Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU karena secara umum, pengesahan pendapatan dan belanja BLU sesuai dengan proyeksi dan deviasinya masih dalam ambang batas
- Indikator Modernisasi Pengelolaan BLU belum tercapai target dikarenakan penggunaan aplikasi BIOS untuk pemutakhiran data belum dilakukan secara optimal.
- Indikator Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU belum tercapai target yang semestinya karena secara total dalam setahun, kenaikan jumlah peserta layanan pengujian masih di bawah target.

2. Informasi Capaian Kinerja berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan

Sebagai satuan kerja BLU, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berorientasi pada penyelenggaraan layanan pengujian yang profesional, responsif, dan berfokus pada kepuasan pengguna layanan. Orientasi pelayanan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan sebagai instrumen evaluasi kinerja layanan yang dilakukan secara berkala dan sistematis. Instrumen survei yang digunakan dirancang untuk mencakup penilaian yang komprehensif terhadap seluruh tahapan pelaksanaan layanan pengujian, mulai dari aspek kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur dan persyaratan, kompetensi serta sikap petugas, hingga persepsi pengguna terhadap keandalan sistem dan sarana prasarana pendukung. Melalui pengukuran kepuasan masyarakat ini, BPPP memperoleh umpan

balik yang terukur dan objektif sebagai dasar untuk menjaga mutu pelayanan sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat perannya sebagai satker BLU yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Tabel 15. Survei Layanan Pengujian BPPP Tahun 2025

No	Topik Pertanyaan yang Sering Diajukan
1	Kemudahan akses informasi • Akses materi dan media sosialisasi pengujian • Informasi yang memadai mengenai lokasi dan waktu UTBK • Akses kepada <i>helpdesk/call center</i>
2	Kejelasan prosedur dan persyaratan • Syarat umum dan khusus yang diperlukan untuk mendaftar • Dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan cara mengunggahnya
3	Kompetensi serta sikap petugas • Peran pengawas dalam proses verifikasi peserta, pembacaan tata tertib, serta teknis kepengawasan • Respons pengawas atau unsur panitia lainnya dalam menghadapi kendala yang dialami peserta
4	Persepsi pengguna terhadap keandalan sistem dan sarana prasarana pendukung • Kondisi ruang ujian dan lokasi di sekitarnya • Kelayakan komputer/laptop/gawai yang digunakan untuk ujian • Kecepatan jaringan internet di TUK

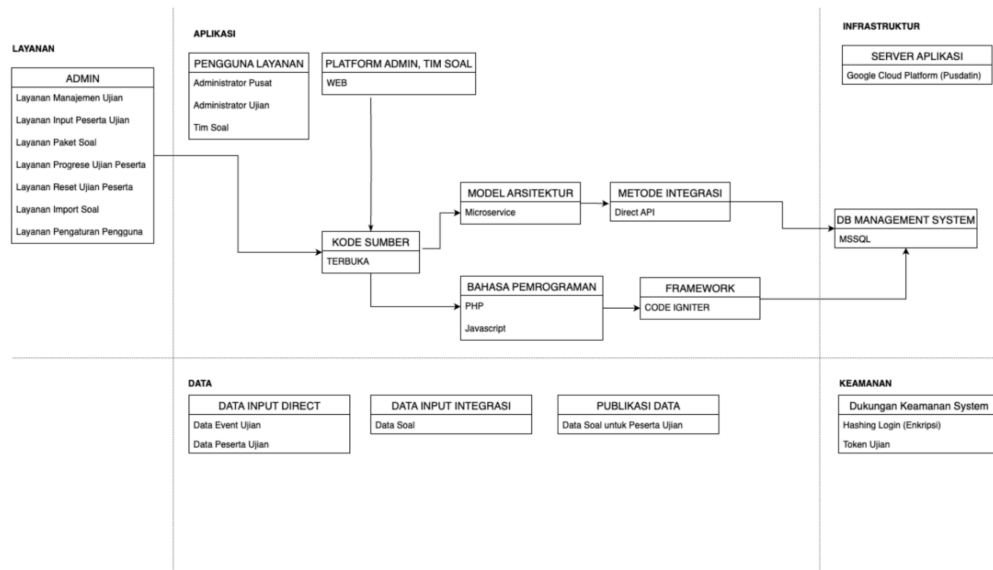
BPPP melakukan survei kepuasan pelanggan atas berbagai layanan yang telah dilakukan, meliputi pelaksanaan layanan SNPMB, PPG, maupun layanan pengujian lainnya. Pada Tahun 2025, BPPP memperoleh Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 91,21, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar

90,73. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan yang diberikan serta meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap kinerja BPPP. Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi BPPP untuk terus membuka ruang perbaikan dan melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan, baik dari aspek sistem layanan, tata kelola, maupun kualitas sumber daya pendukung, agar mutu pelayanan publik yang diberikan dapat semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

3. Inovasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pengujian yang lebih efektif, terstandar, dan akuntabel, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan pengembangan aplikasi manajemen ujian sebagai sarana penguatan tata kelola pelaksanaan asesmen. Pengembangan aplikasi ini mencakup integrasi impor soal dari Bank Soal BPPP, serta pengaturan proyek ujian yang lebih komprehensif melalui ketentuan kelengkapan jawaban, kewajiban penggunaan perangkat kamera, dan pengaturan durasi ujian, sehingga pelaksanaan ujian dapat berjalan sesuai kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan.

Selain itu, sistem diperkuat dengan pengaturan paket pengacakan soal dan mekanisme distribusi agar peserta memperoleh paket soal secara acak, yang mendukung prinsip keadilan dan mitigasi potensi pelanggaran selama ujian. Selain itu penambahan dukungan jenis soal isian singkat beserta mekanisme skoring otomatis. Peningkatan ini diharapkan mampu memperluas variasi bentuk asesmen, meningkatkan efisiensi proses evaluasi, serta memperkuat kualitas layanan pengujian yang profesional dan responsif.



Gambar 15. Aplikasi model

4. Program Crosscutting/Collaborative

Sebagai satuan kerja BLU yang mengemban mandat dalam penyelenggaraan pengujian pendidikan berskala nasional dan berdampak langsung terhadap pengembangan karier individu, BPPP memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam penyediaan lokasi dan sarana layanan pengujian bagi peserta yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, para pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan BPPP juga memperoleh manfaat langsung dari tersedianya sistem seleksi berbasis pengujian yang terstandar dan berkualitas, antara lain dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), seleksi Beasiswa LPDP, Seleksi Politeknik Pariwisata, serta berbagai bentuk seleksi lainnya. Selain itu, layanan pengujian yang diselenggarakan BPPP turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian output kinerja satuan kerja lain, seperti percepatan penuntasan sertifikasi pendidik oleh Direktorat

Pendidikan Profesi Guru pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Di samping itu, BPPP juga berperan dalam mendukung pencapaian output kinerja Satuan Kerja Pusat Prestasi Nasional melalui penyediaan layanan pengujian Pretest dan Posttest bagi peserta pelatihan STEM dan Koding serta Kecerdasan Artifisial (KKA) dalam program Bina Talenta Indonesia. Layanan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta pelatihan secara objektif dan terstandar, sekaligus mendukung program prioritas Kemendikdasmen dalam penguatan literasi STEM, pengembangan talenta digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia unggul yang adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dengan demikian, karakteristik program yang bersifat lintas sektor (*crosscutting*) dan kolaboratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis BPPP dalam menyediakan layanan pengujian pendidikan yang berkualitas, kredibel, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja berbagai satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen akuntabilitas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Informasi capaian kinerja yang disajikan menggambarkan tingkat keberhasilan unit kerja dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.



Capaian Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Ket. Capaian
IKK 1.1 Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	51.06%	51.18%	100.24% (Tercapai)
IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai
IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	BB	BB	Tercapai



Kinerja Anggaran

● Realisasi ● Sisa ● Blokir

Alokasi: Rp370.835.630.000

91%

6%

3%

Perjanjian Kinerja BPPP Tahun 2025 mencantumkan dua Sasaran Kinerja (SK) dan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah tercapai secara keseluruhan targetnya. Ketercapaian tersebut didukung dengan realisasi 90,80% atau Rp336.701.789.025,00 dari alokasi anggaran Rp370.835.630.000,00 (per 19 Januari 2026). Di sisi lain pada alokasi tersebut masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp10.916.129.000,00 (blokir kode A dan kode 2) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi anggaran.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Tata kelola pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran.
2. Mekanisme manajemen risiko terkait layanan pengujian pendidikan.

3. Proses digitalisasi pencatatan PNBPN BLU.

4. Strategi yang mendukung pengembangan layanan pengujian pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja pada tahun berikutnya melalui langkah strategis penguatan tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

1. Memperkuat tata kelola pelaporan keuangan agar lebih sistematis, salah satunya menggunakan aplikasi internal untuk memudahkan tim keuangan melakukan imputasi pelaporan lebih efektif dan efisien.
2. Memperkuat tim manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya resiko kahar (bencana) sehingga layanan pengujian tetap dapat optimal, salah satunya dengan memberikan pelatihan terkait manajemen risiko kepada tim substansi.
3. Mengadopsi aplikasi digital BLU milik Universitas Negeri Semarang untuk mendukung digitalisasi pencatatan PNBPN BLU.
4. Pengembangan Lokasi Pengujian baru untuk mendukung layanan pengujian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja semakin sejalan dengan arah kebijakan Rencana Strategis 2025–2029.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (Awal)



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Jakarta, 30 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan
Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	Persen	51.06
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	Predikat	BB

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7607	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan	Rp187.481.525.000
2	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp10.238.531.000
Total Anggaran			Rp197.720.056.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Standar, Kurikulum,
 dan Asesmen Pendidikan
 Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Jakarta, 30 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
 Pendidikan
 Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Revisi)



**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fransisca Nur'aini Krisna
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 10 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan
Fransisca Nur'aini Krisna



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	Persen	51,06
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	Predikat	BB

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7607	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan	Rp360.596.099.000
2	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp10.239.531.000
Total Anggaran			Rp370.835.630.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Standar, Kurikulum,
 dan Asesmen Pendidikan
 Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Jakarta, 10 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
 Pendidikan
 Fransisca Nur'aini Krisna



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Triwulan I



Laporan Kinerja Triwulan 1 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan				
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	51,06	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	BB	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar

Progress/Kegiatan

- Koordinasi Persiapan Swakelola SNPMB yang terdiri dari SNBP dan UTBK-SNBT dengan 120 PTN
- Koordinasi Persiapan Swakelola UKPPPG yang terdiri dari Calon Guru dan Guru Tertentu
- Koordinasi Persiapan Layanan Pengujian Lainnya pada Tahun Anggaran 2025
- Pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025
- Pelaksanaan Seleksi dan Alokasi Penetapan Hasil Jalur SNBP Tahun 2025

Rincian Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani TW I: 781.861 orang

- UKPPPG Guru Tertentu Periode I (Februari): 5.346 orang
- SNBP (Maret): 776.515 orang



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala/Permasalahan

- Terdapat kebutuhan SDM pengawas ujian dengan jumlah yang cukup banyak dikarenakan penyesuaian teknis pengelolaan dan pengawasan ujian
- Terdapat kendala stabilitas jaringan bagi pengawas
- Terdapat kendala penyusunan dokumen administrasi swakelola dikarenakan bergabungnya beberapa LPTK/TUK baru pada pelaksanaan UKPPPG
- Terdapat kendala anggaran di awal pelaksanaan pengujian dikarenakan efisiensi

Strategi/Tindak Lanjut

- Mengajukan permohonan penugasan kepada satker di lingkup BSKAP terkait bantuan SDM pengawas
- Pembagian akses jaringan dan penyebaran lokasi saat simulasi dan pelaksanaan kepengawasan ujian
- Dilakukan penyesuaian komposisi anggaran pusat dan pada RAB swakelola PTN

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

- Koordinasi usulan buka blokir anggaran terkait SOTK dan anggaran program prioritas di BPPP
- Koordinasi persiapan efisiensi anggaran berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025
- Koordinasi pengajuan dan pengelolaan uang persediaan
- Penyusunan rencana penarikan dana Triwulan I

Kendala/Permasalahan

- Pelaksanaan anggaran untuk beberapa program yang sudah dijadwalkan belum dapat dioptimalkan karena implementasi kebijakan efisiensi anggaran
- Terdapat perubahan nomenklatur kementerian serta pejabat perbendaharaan pada tahun anggaran baru sehingga membutuhkan waktu penyesuaian khususnya terkait dokumen administratif

Strategi/Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan pihak terkait untuk proses usulan buka blokir anggaran karena perubahan SOTK
- Koordinasi internal penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka menjaga kualitas luaran/output tetap optimal

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

- Koordinasi internal terkait strategi pelaksanaan program di lingkungan BPPP
- Implementasi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPPP Tahun 2024
- Proses reviu usulan rencana strategis yang mendukung program kementerian/lembaga Tahun 2025-2029



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Penyusunan Laporan Kinerja BPPP tahun 2024

Kendala/Permasalahan

Keterbatasan SDM yang telah mengikuti pelatihan SAKIP dan implementasi yang belum optimal

Strategi/Tindak Lanjut

Dilakukan koordinasi serta pendampingan dengan pihak terkait (unit eselon I, biro, serta satker lain dalam lingkup BSKAP) terkait implementasi SAKIP yang lebih baik

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7607.PBH.001] Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	Rp1.024.992.000	Rp22.715.000	2.22
2	[DI.7607.QAA.001] Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	781861	2038647	Rp314.688.970.000	Rp229.256.903.178	72.85
3	[DI.7607.QMA.002] Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Data	0	0	Rp308.916.000	Rp6.480.000	2.10
4	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
5	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp230.879.022	23.32
6	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp9.238.531.000	Rp4.643.325.058	50.26
Total Anggaran					Rp326.261.409.000	Rp234.160.302.258	71.77

D. Rekomendasi Pimpinan

adanya blokir anggaran di triwulan 1 memerlukan perencanaan yang agile mengedepankan cara-cara yang lebih efisien. hal ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk layanan seleksi penerimaan mahasiswa baru di periode februari-maret. sehingga direkomendasikan proses blokir anggaran tetap memperhatikan program super prioritas yang bersifat layanan langsung kepada masyarakat di skala nasional



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Jakarta, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengendalian Pengujian
Pendidikan

Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan II



Laporan Kinerja Triwulan 2 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan				
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	51,06	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	BB	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar

Progress/Kegiatan

- Pelaksanaan Seleksi dan Alokasi Penetapan Hasil Jalur SNBT Tahun 2025
- Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Layanan Pengujian SBS-LPDP Tahap 1 Tahun 2025
- Penyusunan Instrumen Pengujian dan Pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Poltekpar (SBM-Poltekpar) Tahun 2025
- Penyusunan Instrumen Pengujian dan Pelaksanaan SKD dan SKB untuk seleksi Guru P3 SMA Taruna Nusantara TA 2025
- Pelaksanaan UKPPPG Calon Guru Periode I Tahun 2025
- Persiapan UKPPPG Guru Tertentu Periode II Tahun 2025
- Pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu Periode II Tahun 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani TW II: 915.062 orang

- SBS LPDP Tahap I (April): 27.086 orang
- UTBK-SNBT (Mei): 860.976 orang
- SBM Politeknik Pariwisata (Mei): 5.644 orang
- SKD Guru P3 SMA Taruna Nusantara (Mei): 371 orang
- SKB Guru P3 SMA Taruna Nusantara (Mei): 161 orang
- UKPPPG Calon Guru Periode I (Juni): 20.824 orang

Kendala/Permasalahan

- Terdapat kendala teknis aplikasi ujian saat pelaksanaan UKPPPG hari pertama dan hari kedua

Strategi/Tindak Lanjut

- Dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi LPTK/TUK baru dalam mengawal pelaksanaan UKPPPG di setiap lokasi
- Dilakukan penyesuaian teknis pada aplikasi pengujian sehingga dapat segera terselesaikan dan berjalan lancar tanpa kendala pada hari kedua

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

- Koordinasi anggaran terkait usulan revisi penambahan pagu belanja BLU dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas yang bersumber dari dana PNPB/BLU
- Pemutakiran dan penyusunan rencana penarikan dana triwulan II

Kendala/Permasalahan

- Terdapat ketidaksesuaian data supplier terkait pembayaran tagihan kontrak (hotel, swakelola) sehingga penyelesaian tagihan melewati batas waktu yang telah ditentukan
- Terdapat selisih waktu yang cukup lama dalam proses pertanggungjawaban anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

- Dilakukan konfirmasi dengan pihak penyedia/penerima swakelola terkait data supplier serta berkoordinasi dengan pihak KPPN terkait penyelesaian retur SP2D
- Dilakukan akselerasi proses pertanggungjawaban anggaran

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

- Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi TA 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



- Koordinasi finalisasi usulan Renstra 2025-2029
- Penyusunan tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2024

Kendala/Permasalahan

- Terdapat kendala penyusunan dokumen pendukung tindak lanjut LHE AKIP 2024 yang relevan
- Terdapat kemungkinan kebijakan pergeseran program prioritas sehingga berpotensi adanya ketidaksesuaian dengan hasil usulan renstra

Strategi/Tindak Lanjut

- Dilakukan akselerasi dan asistensi dengan pihak terkait untuk penyelesaian dokumen pendukung tindak lanjut LHE AKIP 2024
- Dilakukan koordinasi lintas kementerian seta dengan pihak terkait dalam rangka finalisasi usulan renstra yang sesuai dan mendukung program kementerian/lembaga

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7607.PBH.001] Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	Rp1.024.992.000	Rp22.715.000	2.22
2	[DI.7607.QAA.001] Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	1696923	2038647	Rp314.688.970.000	Rp229.256.903.178	72.85
3	[DI.7607.QMA.002] Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Data	0	0	Rp308.916.000	Rp6.480.000	2.10
4	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
5	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp230.879.022	23.32
6	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp9.238.531.000	Rp4.643.325.058	50.26
Total Anggaran					Rp326.261.409.000	Rp234.160.302.258	71.77

D. Rekomendasi Pimpinan

Relaksasi anggaran pada triwulan II membuat pelaksanaan program dan layanan pengujian bisa berjalan dengan lebih baik, namun masih terdapat anggaran yang diblokir dan batasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, direkomendasikan agar pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan skala prioritas yang mendukung pelaksanaan layanan pengujian.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Jakarta, 30 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengendalian Pengujian
Pendidikan

Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Balai Besar
Serifikasi
Elektronik

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW ₃	Realisasi
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan				
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	51,06	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	BB	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar

Progress/Kegiatan

Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan pada hasil pengukuran triwulan II terkait implementasi skala prioritas pada pelaksanaan kegiatan. Pada triwulan III tim teknis dan substansi berfokus pada persiapan dan pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu Periode II dan SBS LPDP Tahap 2 Tahun 2025. Adapun langkah yang telah dilakukan antara lain persiapan teknis, penyusunan instrumen, koordinasi kesekretariatan, hingga pemantauan dan evaluasi. Semua tahapan tersebut juga didukung oleh tim administrasi-keuangan dalam rangka optimalisasi output layanan.

Rincian Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani TW III: 368.305 orang

- UKPPPG Guru Tertentu Periode II (Juli): 341.724 orang



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- SBS LPDP Tahap II (September): 26.581 orang

Kendala/Permasalahan

- Pelaksanaan UKPPG Guru Tertentu Periode 2 terdapat kendala pada sistem karena pada waktu pengerjaan subtes tertentu yang memerlukan aktivitas input jawaban dengan mengetik pada kolom yang disediakan mengakibatkan beban server meningkat secara signifikan
- Terdapat kendala terkait SDM pengawas yang belum terlalu memahami panduan kepengawasan sehingga berimplikasi pada tugas kepengawasan yang kurang efektif
- Linimasa yang relatif padat dan beririsan menyebabkan proses analisis bahan kebijakan dan pertanggungjawaban yang kurang optimal

Strategi/Tindak Lanjut

- Dilakukan penyesuaian oleh tim teknis dan IT terkait waktu pengambilan respon di setiap jawaban yang dicantumkan oleh peserta yang semula setiap 3 detik menjadi setiap 1 menit untuk menurunkan beban server ujian secara signifikan
- Telah dilakukan pendampingan teknis lebih mendalam oleh tim helpdesk kepada beberapa pengawas yang sempat mengalami kendala kepengawasan
- Dilakukan optimalisasi dari sisi SDM untuk tetap mengoptimalkan output tetap sesuai dan tepat waktu

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

- Koordinasi anggaran terkait usulan revisi penambahan pagu belanja BLU dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas yang bersumber dari dana PNB/BLU menggunakan mekanisme revisi dalam ambang batas dan kelebihan atas target pendapatan BLU
- Pemutakiran dan penyusunan rencana penarikan dana triwulan III hingga IV

Kendala/Permasalahan

- Terdapat pembaharuan mekanisme koordinasi proses pemulihan pagu yang semula melalui konfirmasi dengan pihak KPPN dan saat ini menjadi pengajuan tiket melalui sistem yang secara tidak langsung menambah waktu penyelesaian karena memerlukan tahapan yang lebih banyak. Di sisi lain, pagu yang dalam proses pemulihan akan dilakukan optimalisasi untuk mendukung program satker
- Terdapat kendala pada aplikasi pertanggungjawaban terkait fitur TTE sebagai kelengkapan administrasi dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat diakses untuk sementara waktu.

Strategi/Tindak Lanjut

- Telah dilakukan koordinasi dengan pihak KPPN terkait penyelesaian proses pemulihan pagu satker
- Telah dilakukan koordinasi dengan tim teknis aplikasi untuk penyelesaian akses TTE sehingga proses pertanggungjawaban dapat berjalan normal kembali.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Progress/Kegiatan

- Koordinasi persiapan evaluasi AKIP oleh tim evaluasi BPPP dan tim evaluasi unit eselon I BSKAP yang mencakup penyusunan serta pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung
- Penyusunan draft Rencana Strategis Bisnis BPPP tahun 2025-2029 hasil penyesuaian dari RSB BPPP periode sebelumnya (2023-2027) dalam rangka memedomani tahun renstra baru

Kendala/Permasalahan

- Terdapat beberapa dokumen pendukung yang belum tersedia sebagai kelengkapan administrasi evaluasi AKIP
- Penyusunan draft RSB baru mengalami penundaan dalam waktu yang cukup lama dikarenakan linimasa dan target penyelesaian yang belum ditentukan secara konkret

Strategi/Tindak Lanjut

- Telah dilakukan asistensi secara luring dengan unit eselon I BSKAP terkait strategi pelaksanaan evaluasi AKIP dan pemenuhan data serta dokumen pendukung dalam rangka mengoptimalkan hasil evaluasi tahun 2025
- Perlu dilakukan segera koordinasi internal dan menjadikan prioritas terkait penyusunan RSB Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran di periode tersebut

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7607.PBH.001] Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	Rp1.024.992.000	Rp134.062.010	13.08
2	[DI.7607.QAA.001] Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	2038647	2038647	Rp314.688.970.000	Rp263.759.087.641	83.82
3	[DI.7607.QMA.002] Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Data	0	0	Rp308.916.000	Rp10.024.000	3.24
4	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
5	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp234.262.972	23.66
6	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp9.238.531.000	Rp5.153.571.716	55.78
Total Anggaran					Rp326.261.409.000	Rp269.291.008.339	82.54

D. Rekomendasi Pimpinan

periode anggaran Juli- September adalah periode pelaksanaan layanan ujian PPG baik untuk kelulusan calon guru maupun kelulusan guru tertentu. oleh karena itu pencermatan terhadap kesediaan anggaran BLU



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



dengan kebutuhan belanja BLU perlu dilakukan dengan kehati-hatian. pengajuan penambahan DIPA BLU perlu memperhitungkan dengan seksama proyeksi belanja, sehingga penambahan pagu menjadi optimal, tidak berlebih namun juga tidak kurang. Selain itu hal lain yang perlu dikawal dengan baik adalah progress pengesahan pendapatan serta pengesahan belanja BLU. fleksibilitas pengolahan tidak berujung kepada molornya pengesahan.

Jakarta, 7 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan

Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan IV



Laporan Kinerja Triwulan 4 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan				
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar	51.06	Persen	51.06	51.18
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB	BB	Predikat	BB	BB

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
[IKK 1.1] Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar

Progress/Kegiatan

Pada triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa perubahan kebijakan khususnya terkait penambahan linimasa pelaksanaan UKPPPG yang merupakan hasil kebijakan bersama dengan pihak Direktorat PPG atas arahan Menteri.

Tahap penyesuaian linimasa dan persiapan dilakukan dalam upaya menjaga kualitas pelaksanaan layanan pengujian, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah mekanisme penyaluran dana pelaksanaan pengujian yang semula seluruhnya dengan mekanisme swakelola menjadi kombinasi swakelola dan penggantian biaya (reimburse) karena sebagian Tempat Uji Kompetensi (TUK) merupakan sekolah yang tidak dapat menjalankan mekanisme swakelola.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Dalam penyaluran dana pelaksanaan ujian dengan mekanisme penggantian biaya, BPPP melakukan koordinasi lebih mendalam dengan pihak sekolah agar administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rincian Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani TW IV: 549.275 orang

- UKPPPG Guru Tertentu Periode III (Oktober): 227.508 orang
- Seleksi Masuk Calon Guru (Substantif) (November): 1.616 orang
- UKPPPG Calon Guru Periode II (November): 80.025 orang
- UKPPPG Guru Tertentu Periode IV (November): 143.079 orang
- UKPPPG Guru Tertentu Daerah Khusus (November): 2.581 orang
- UKPPPG Guru Tertentu Periode V (Desember) : 61.810 orang
- UKPPPG Guru Tertentu Periode VI (Desember) : 28.186 orang
- Seleksi Mandiri UNTAN (Juni) 4.470 orang (belum terlaporkan di triwulan II)

Kendala/Permasalahan

- Terdapat kejadian kahar pada rentang pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu bagi Daerah Khusus Terkendala Internet dan Periode 5 Tahun 2025, sehingga peserta dari beberapa daerah terdampak terkendala mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan.
- Padatnya linimasa yang ditetapkan oleh mitra terkait beberapa pengujian di Bulan Desember 2025 cukup menjadi kendala pada saat pelaksanaan pengawasan di LPTK serta pengolahan dan pelaporan hasil pengujian oleh BPPP.

Strategi/Tindak Lanjut

- Dilakukan koordinasi dengan Direktorat PPG dan pihak terkait untuk penyesuaian jadwal pelaksanaan ujian bagi peserta yang terdampak bencana, sehingga peserta yang terdampak bencana tetap dapat mengikuti ujian dengan baik.
- Dilakukan penyesuaian jadwal pengolahan dan pelaporan hasil pengujian dengan menggabungkan pengolahan hasil dari beberapa periode pengujian dalam waktu yang sama dan dilaporkan bersamaan pada satu waktu.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan pada hasil pengukuran triwulan III terkait pencermatan terhadap kesediaan anggaran BLU dan progress pengesahan pendapatan-belanja BLU.

Pada triwulan IV, BPPP melakukan pengajuan revisi anggaran terkait penambahan pagu belanja DIPA BLU BPPP untuk mengakomodir penambahan linimasa layanan UKPPPG sampai dengan bulan Desember 2025. Revisi anggaran penambahan pagu belanja DIPA BLU dilakukan dengan mekanisme dalam ambang batas dan penggunaan kelebihan atas target pendapatan Tahun 2025.

Di sisi lain BPPP juga melakukan proses revisi anggaran secara internal atau revisi POK dalam rangka memperkuat mekanisme perencanaan kontingensi dan mengakomodir percepatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

pengesahan belanja.

Kendala/Permasalahan

Akibat penambahan linimasa layanan UKPPPG yang relatif mendekati akhir tahun anggaran, terdapat keterlambatan proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan baik secara internal satker maupun pertanggungjawaban yang melibatkan pihak eksternal (LPTK, TUK, pelaksana kegiatan eksternal lainnya)

Strategi/Tindak Lanjut

Dilakukan percepatan dan koordinasi pihak eksternal secara lebih intensif, serta optimalisasi SDM internal satker dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

- Pelaksanaan evaluasi AKIP mandiri oleh tim evaluasi BPPP meliputi penyusunan kertas kerja, revidi kelengkapan dokumen pendukung dan wawancara
- Koordinasi eksternal dengan tim evaluasi unit Eselon I dan tim evaluator dari pihak Inspektorat Jenderal terkait hasil evaluasi AKIP Tahun 2025

Kendala/Permasalahan

Terdapat kendala pemenuhan dokumen pendukung terkait digitalisasi pencatatan transaksi PNB/BLU berdasarkan hasil rekomendasi evaluator AKIP

Strategi/Tindak Lanjut

Terkait digitalisasi pencatatan transaksi PNB/BLU, BPPP mengajukan sebagai satker piloting untuk penerapan aplikasi SAKTI BLU Kemenkeu

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7607.PBH.001] Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	Rp1.024.992.000	Rp489.067.277	47.71
2	[DI.7607.QAA.001] Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	2368314	2614503	Rp359.262.191.000	Rp332.796.610.481	92.63



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DI.7607.QMA.002] Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Data	0	1	Rp308.916.000	Rp133.300.000	43.15
4	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	1	Rp10.000.000	Rp9.992.000	99.92
5	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	1	Rp990.000.000	Rp551.844.122	55.74
6	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	1	Rp9.239.531.000	Rp7.725.544.979	83.61
Total Anggaran					Rp370.835.630.000	Rp341.706.358.859	92.14

D. Rekomendasi Pimpinan

Untuk pelaksanaan layanan pengujian tahun mendatang, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan layanan pengujian dan pengelolaan keuangan layanan pengujian, sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pelaporan keuangan agar lebih sistematis, salah satunya menggunakan aplikasi internal untuk memudahkan tim keuangan melakukan imputasi pelaporan lebih efektif dan efisien
2. Memperkuat tim manajemen resiko untuk mengantisipasi terjadinya resiko kahar (bencana) sehingga layanan pengujian tetap dapat optimal, salah satunya dengan memberikan pelatihan terkait manajemen resiko kepada tim substansi
3. Mengadopsi aplikasi digital BLU milik Universitas Negeri Semarang untuk mendukung digitalisasi pencatatan PNPB BLU
4. Pengembangan Lokasi Pengujian baru untuk mendukung layanan pengujian

Jakarta, 8 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan

Fransisca Nur'aini Krisna



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Lampiran 7. Pernyataan Reviu Laporan Kinerja BPPP Tahun 2025

**Pernyataan Telah Direviu
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Tahun Anggaran 2025**

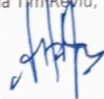
Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Fransisca Nur'aini Krisna